



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK KOTA CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Visi dan misi kota Banjarbaru yaitu terwujudnya Banjarbaru Kota Cerdas sebagai pintu gerbang idaman (berinovasi, berdaya saing, aman dan nyaman) diperlukan dukungan pemangku kepentingan, akademisi, pengusaha/swasta, komunitas/Masyarakat dan pemerintah di Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan dalam rangka efisiensi dan perbaikan dan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan warga;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan Banjarbaru Kota Cerdas perlu adanya peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Kota Cerdas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA INDUK KOTA CERDAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Kota Cerdas adalah kota yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan warga.
5. Rencana Induk Kota Cerdas adalah dokumen perencanaan strategis pembangunan Kota Cerdas yang disusun oleh tim teknis dengan mengacu kepada dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
6. Visi adalah tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mewujudkan Kota Cerdas.
7. Sasaran adalah sesuatu yang menjadi tujuan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mewujudkan Kota Cerdas.
8. Masyarakat adalah kelompok orang dan/atau penduduk yang tinggal di Kota Banjarbaru.

Pasal 2

Rencana Induk Kota Cerdas bertujuan:

a. memberikan...

- a. memberikan arahan percepatan strategi, kebijakan dan program pembangunan Daerah yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan;
- b. menetapkan panduan perencanaan pengembangan Kota Cerdas berdasarkan enam dimensi yaitu :
 1. tata kelola pemerintahan cerdas;
 2. pembinaan dan pengembangan ekonomi Masyarakat cerdas;
 3. pembinaan sosial Masyarakat cerdas, pencitraan Kota Cerdas;
 4. pengelolaan kesehatan;
 5. transportasi dan pola hidup Masyarakat cerdas, dan;
 6. pengelolaan lingkungan hidup cerdas.
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- d. mengimplementasikan program percepatan kegiatan Kota Cerdas.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Induk Kota Cerdas meliputi:

- a. sistematika;
- b. Visi; dan
- c. Sasaran.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Rencana Induk Kota Cerdas disusun dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebagai berikut:

BAB I pendahuluan;

BAB II Visi Kota Cerdas;

BAB III strategi pembangunan Kota Cerdas;

BAB IV rencana aksi Kota Cerdas;

BAB V peta jalan pembangunan Kota Cerdas;

BAB VI penutup.

- (2) Uraian rincian Rencana Induk Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III VISI

Pasal 5

Visi Rencana Induk Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu terwujudnya Banjarbaru Kota Cerdas sebagai pintu gerbang idaman (berinovasi, berdaya saing, aman dan nyaman).

BAB IV SASARAN

Pasal 6

Sasaran Rencana Induk Kota Cerdas dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. tata kelola Pemerintahan Daerah cerdas bertujuan meningkatkan kinerja pelayanan publik dan meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah;
- b. pencitraan Kota Cerdas bertujuan membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata, membangun *platform* dan memasarkan ekosistem bisnis Daerah dan membangun dan memasarkan wajah kota;
- c. pembinaan dan pengembangan ekonomi Masyarakat cerdas bertujuan membangun ekosistem industri yang berdaya saing, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun ekosistem transaksi keuangan;
- d. transportasi dan pola hidup Masyarakat cerdas bertujuan harmonisasi tata ruang wilayah, meningkatkan kesehatan Masyarakat dan menjamin ketersediaan sarana transportasi;
- e. pembinaan sosial Masyarakat cerdas mewujudkan interaksi Masyarakat yang efisien, membangun ekosistem budaya belajar dan mewujudkan sistem keamanan Masyarakat;
- f. pengelolaan lingkungan hidup cerdas bertujuan mengembangkan program proteksi lingkungan, mengembangkan tata kelola sampah dan limbah dan mngembangkan tata kelola energi yang bertanggung jawab.

BAB V

ANGGARAN

Pasal 7

Anggaran Pelaksanaan Peraturan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERUBAHAN RENCANA INDUK KOTA CERDAS

Pasal 8

- (1) Rencana Induk Kota Cerdas dapat diubah berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun pelaksanaan atau bersamaan dengan ditetapkanannya rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 9

Rencana Induk Kota Cerdas yang diatur dalam Peraturan Walikota ini sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah yang materi muatannya mengatur mengenai Rencana Induk Kota Cerdas.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Kebijakan Daerah yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Oktober 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



H. Rizana Mirza, SH., M.Kes
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660828 199303 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara geografis Kota Banjarbaru terletak antara 3° 25' 40"-3° 28' 37" Lintang Selatan dan 114° 41' 22"-114° 54' 25" Bujur Timur. Posisi geografis Kota Banjarbaru adalah 35 km pada arah 296°30' sebelah tenggara Kota Banjarmasin yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarbaru sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 memiliki wilayah seluas ±371,38 Km² atau hanya 0,88% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan luasan tersebut, Kota Banjarbaru menempati wilayah terkecil kedua setelah Kota Banjarmasin dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan. Berdasarkan batas administrasi wilayah, Banjarbaru memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Martapura (Kabupaten Banjar)
Sebelah Timur : Kecamatan Karang Intan (Kabupaten Banjar)
Sebelah Selatan : Kecamatan Bati-Bati (Kabupaten Tanah Laut)
Sebelah Barat : Kecamatan Gambut (Kabupaten Banjar)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Gambar 4.1 di bawah ini.

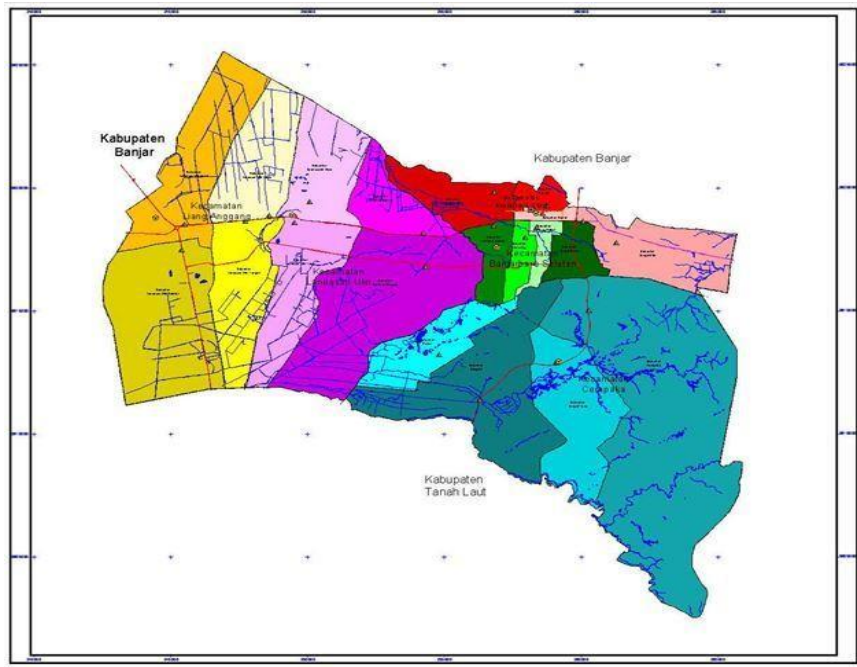
Tabel 1

Luas Wilayah Kota Banjarbaru

NO	KECAMATAN	PERSENTASE (%)	LUAS WILAYAH (Km ²)
1	Landasan Ulin	24,89	92,42
2	Liang Anggang	23,12	85,86
3	Cempaka	39,50	146,70
4	Banjarbaru Utara	6,58	24,44
5	Banjarbaru Selatan	5,91	21,96
TOTAL		100,00	371,38

Sumber: Kota Banjarbaru Dalam Angka 2017

Gambar 1.1...



Gambar 1. 1
Peta Administrasi Kota Banjarbaru

Dalam konstelasi hubungan antar-wilayah, Kota Banjarbaru memiliki kedudukan yang penting dan strategis, khususnya dalam sistem transportasi darat dan udara. Kota Banjarbaru memiliki akses Jalan Simpang Tiga Liang Anggang yang menghubungkan Banjarmasin – Kotabaru dan Banjarmasin – Hulu Sungai hingga ke Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Selain itu, Banjarbaru memiliki akses pelabuhan laut Trisakti sebagai gerbang jalur transportasi laut melalui Jalan Lingkar Selatan Liang Anggang dan akses Bandar Udara Syamsuddin Noor sebagai jalur transportasi udara di Kalimantan Selatan. Kondisi yang demikian menjadikan Kota Banjarbaru sebagai Kota Pendidikan, Industri, Jasa dan Perdagangan, serta Pemerintahan dan Permukiman.

Penduduk Kota Banjarbaru memiliki peningkatan setiap tahunnya. Tercatat pada Tahun 2015 terdapat 241.369 jiwa meningkat menjadi 248.423 ditahun 2017. Jumlah penduduk terpadat berada di Kecamatan Landasan Ulin dengan jumlah penduduk sebanyak 64.006 jiwa dan yang paling berkepadatan tinggi yakni Kecamatan Banjarbaru Selatan yaitu sebesar 2.405 jiwa penduduk per Km². Bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun serta terbatasnya sumber daya alam menjadikan pengelolaan kota menjadi semakin kompleks. Kondisi ini menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki serta meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi.

Konsep kota cerdas (*Smart City*) yang menjadi isu besar di kota-kota besar di seluruh dunia mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota menggunakan pendekatan *citizen centric* sehingga terjadi interaksi yang lebih dinamis dan erat antara warga dengan penyedia layanan, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah. Interaksi dua arah ini akan terus berkembang dan berproses sehingga nantinya kota akan menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali sertatangguh dalam merespon perubahan dan tantangan yang baru dengan lebih cepat.

Arti “cerdas” menurut Nam & Pardo (dalam Djunaedi, 2014) adalah: (1) dalam bidang perencanaan kota, “cerdas” diartikan sebagai strategis, terutama dalam memilih prioritas, arah, kebijakan dan sebagainya, dan (2) terkait teknologi, maka “cerdas” mengandung prinsip komputasi otomatis (*self-configuration, self healing, self-protection, self-optimization*); ditunjukkan antara lain memiliki sensor sda actuators. Lebih lanjut lagi, secara sederhana sebuah kota cerdas (*Smart City*) adalah kota yang sistem manajemen kotanya secara otomatis mampu memberitahu: (1) bahwa sedang timbul suatu masalah perkotaan (diberitahu oleh sensor yang dipasang di kota), (2) bahwa akan timbul suatu masalah perkotaan (diberitahu oleh sensor dan sistem prediksi), dan (3) sistem manajemen perkotaan mampu memberikan usulan tindakan otomatis (dimungkinkan oleh sistem actuator) atau tidak-otomatis untuk mengatasi masalah (Djunaedi, 2014).

Di Indonesia dalam pengimplementasiannya begitu banyak tantangan, diantaranya seperti sarana, prasarana, infrastruktur teknologi dan informasi yang biaya membangunnya memerlukan biaya yang cukup tinggi. Kemudian tantangan lainnya, kebijakan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang belum seiya sekata dalam menterjemahkan konsep kota cerdas (*Smart City*) tersebut. Padahal pondasi kota cerdas (*Smart City*) untuk melaksanakan 6 (enam) dimensinya adalah *Smart Governance*, *Smart Governance* memerlukan *smart Government*, *Smart Government* perlu didukung oleh *e-Government* (sistem Pemerintahan berbasisi elektronik). Kemudian tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia baik aparatur pemerintah dan masyarakat pengguna layanan yang harus diedukasi menerima perubahan kultur yang semuanya mengarah ke transparansi dan digitalisasi.

Guna mewujudkan kota-kota di Indonesia menjadi kota yang *smart* pemerintah dengan melibatkan kementerian terkait menggulirkan program Gerakan Menuju 100 kota cerdas (*Smart City*) Indonesia. Pada tahun 2017 terpilih 25 kabupaten/kota untuk menerima pendampingan dalam penyusunan Rencana Induk Kota Cerdas (*Masterplan Smart City*). Pada tahun kedua tahun 2018 ini dipilih 50 kabupaten/kota. Banjarbaru sebagai kota dengan visi pelayanan yang berkarakter, yang ditekankan harus melayani warganya dengan baik, transparan dan semakin efisien mengikuti seleksi gerakan 100 kota cerdas (*Smart City*) tersebut dan Banjarbaru terpilih sehingga pada tanggal 8 Mei 2018 di Jakarta dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kota Banjarbaru yang di hadiri oleh Walikota Banjarbaru, Sekda, Ketua DPRD, Kepala Bappeda dan Kepala Diskominfo. Kemenkominfo akan melakukan pendampingan dalam pembuatan Rencana Induk Kota Cerdas (*Masterplan Smart City*) Kota Banjarbaru. Oleh karena itu diperlukan *Masterplan* sebagai *guidance* merealisasikan konsep kota cerdas (*Smart City*) secara bertahap.

B. Tujuan *Masterplan*

Rencana Induk Kota Cerdas (*Masterplan Smart City*) merupakan dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan *Smart City* yang berupa inisiatif-inisiatif program beserta peta jalannya (*road map*). Inisiatif *Smart City* dibuat berdasarkan permasalahan yang muncul di Kota Banjarbaru, sehingga menghasilkan inisiatif yang memberikan solusi yang secara umum bertujuan ingin meningkatkan (1) kualitas hidup masyarakat, (2) meningkatkan ekonomi masyarakat dan (3) meningkatkan keberlangsungan lingkungan hidup dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu a) pendekatan pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi, b) pendekatan pemberdayaan potensi kota, serta c) pendekatan pemberdayaan manusia yang berkesinambungan.

Inisiatif-inisiatif yang dimuat dalam Rencana Induk Kota Cerdas (*Masterplan Smart City*) ini dibuat berdasarkan data permasalahan di daerah yang telah disederhanakan, sehingga inisiatif yang diciptakan bersifat solusi dan memiliki peluang besar untuk diimplementasikan. Dengan adanya Rencana Induk Kota Cerdas (*Masterplan Smart City*) Kota Banjarbaru tahun 2018-2023 ini, permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Banjarbaru dapat diselesaikan sesuai dengan target-target yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan.

C. Landasan Hukum...

C. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan Kota Cerdas (*Smart City*) di Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang Undang No 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang- Undang No 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik.
12. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat.
17. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
18. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 73 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Berkarakter.
19. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri di Kota Banjarbaru.

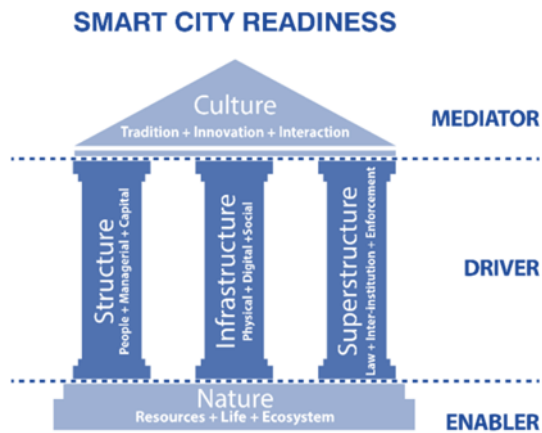
20. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/278/KUM/2018 Tentang Tim Pelaksana *Smart City* Banjarbaru.
21. Nota Kesepahaman Antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Dengan Pemerintah kota Banjarbaru Nomor 22/KOMINFO/HK.03.02/05/2018 dan Nomor 33/MOU/KUM/2018 Tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 *Smart City* Kota Banjarbaru.
22. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/277/KUM/2018 Tentang Dewan *Smart City* Banjarbaru.

D. Kerangka Pikir Kota Cerdas (*Smart City*)

Kerangka pikir (*frameworks*) Kota Cerdas (*Smart City*) dalam rencana induk kota cerdas (*Masterplan Smart City*) ini disesuaikan dengan kerangka pikir yang telah dipaparkan dalam Buku Panduan Penyusunan *Masterplan Smart City 2017 – Gerakan Menuju 100 kota cerdas (Smart City)* yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tahun 2017.

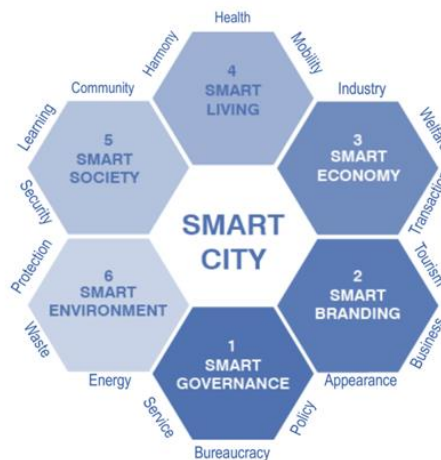
Dalam membangun Kota Cerdas (*Smart City*), terlebih dahulu suatu kota/kabupaten harus memiliki Kesiapan Daerah Pintar atau Kota Cerdas (*Smart City*) *Readiness*. Terdapat beberapa elemen utama dalam kesiapan daerah pintar, yaitu potensi alam (*nature*); struktur daerah (*structure*); infrastruktur (*infrastructure*); suprastruktur (*superstructure*); dan budaya (*culture*). Untuk keperluan penyusunan *Masterplan* ini, kajian Kota Cerdas (*Smart City*) *Readiness* difokuskan kepada 3 elemen saja yaitu Struktur, Infrastruktur, dan Suprastruktur. Ilustrasi elemen kesiapan daerah pintar tersebut dapat dilihat pada Gambar 3:

- Struktur; pembangunan sumber daya manusia (SDM) pelaksana (*people*) dan penerima manfaat Kota Cerdas (*Smart City*), penyiapan sumber daya anggaran, dan sumber daya tata kelola dan tata pamong;
- Infrastruktur; pembangunan infrastruktur pendukung Kota Cerdas (*Smart City*) yang meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau TIK, dan infrastruktur social untuk kepentingan umum;
- Suprastruktur; penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata-laksana pelaksanaan pembangunan Kota Cerdas (*Smart City*).



Gambar 1. 2 Elemen Kota Cerdas (Smart City)Readiness
 Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Kerangka pikir berikutnya dari sebuah Kota Cerdas (*Smart City*) adalah dimensi-dimensi yang terdapat di dalam Kota Cerdas (*Smart City*) itu sendiri.

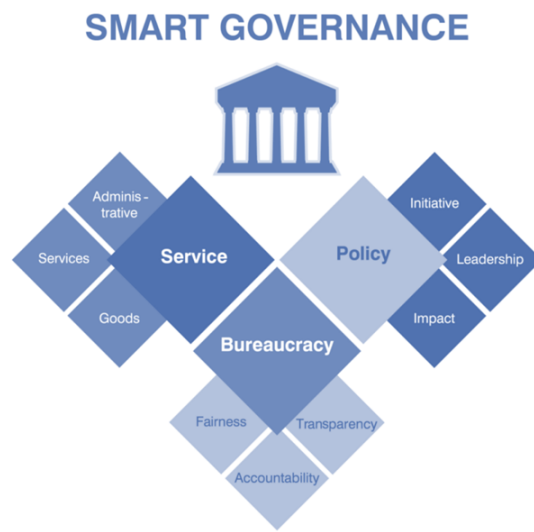


Gambar 1. 3 Dimensi Kota Cerdas (Smart City)
 Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

1. *Smart Governance*

Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. Sehingga *Smart Governance* di dalam dimensi Kota Cerdas (*Smart City*) merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan *business process* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan. sasaran *Smart Governance* adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Tentu saja dalam melakukan perubahan pola-pola tradisional dalam tata kelola pemerintahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun adopsi teknologi adalah hal yang akan memberikan percepatan terhadap perubahan tersebut.

Gambar 1.4...



Gambar 1. 4 Smart Governance
 Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

2. Smart Branding

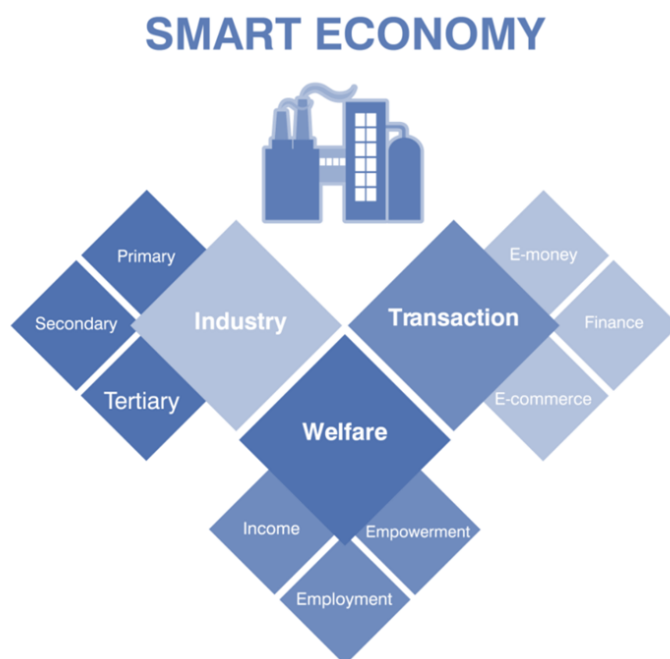
Dimensi kedua dalam Kota Cerdas (*Smart City*) adalah *Smart Branding*, yaitu *branding* daerah yang pintar. *Smart Branding* adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. *Smart Branding* menjadi salah satu dimensi dalam Kota Cerdas (*Smart City*) karena di dalam era informasi seperti saat ini, sebuah kota tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokal-nya, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerahnya. Sehingga pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dari konsep branding daerah adalah peningkatan *brand value* daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sasaran *Smart Branding* adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.



Gambar 1. 5 Smart Branding

3. *Smart Economy*

Dimensi ketiga dalam Kota Cerdas (*Smart City*) adalah *Smart Economy* atau tata kelola perekonomian yang pintar. *Smart Economy* dalam dalam *Smart City* dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini. Sasaran dimensi *Smart Economy* dalam Kota Cerdas (*Smart City*) adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*. Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembangkan tiga elemen dalam *Smart Economy*, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan.

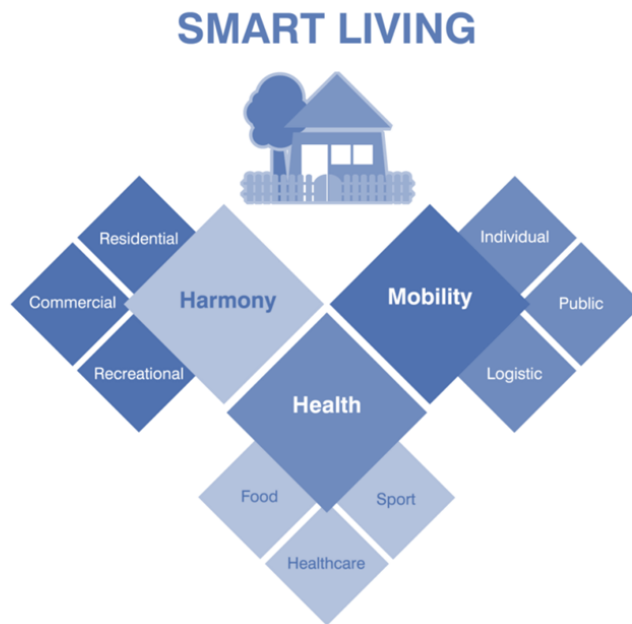


Gambar 1. 6 Smart Economy

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

4. *Smart Living*

Smart Living menjadi salah satu dimensi dalam Kota Cerdas (*Smart City*) untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah Kota Cerdas (*Smart City*). Sasaran dari *Smart Living* di dalam Kota Cerdas (*Smart City*) adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.

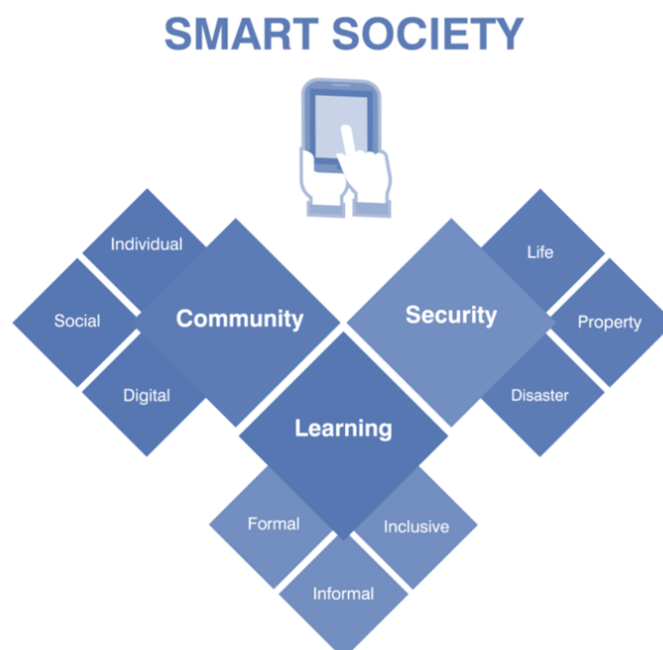


Gambar 1. 7 Smart Living

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

5. *Smart Society*

Smart society sebagai bagian dari Kota Cerdas (*Smart City*) merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam sebuah Kota Cerdas (*Smart City*), interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio-teknis di mana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi. Sasaran *smart society* dalam Kota Cerdas (*Smart City*) adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. yang diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen di dalam *smart society*, yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*).

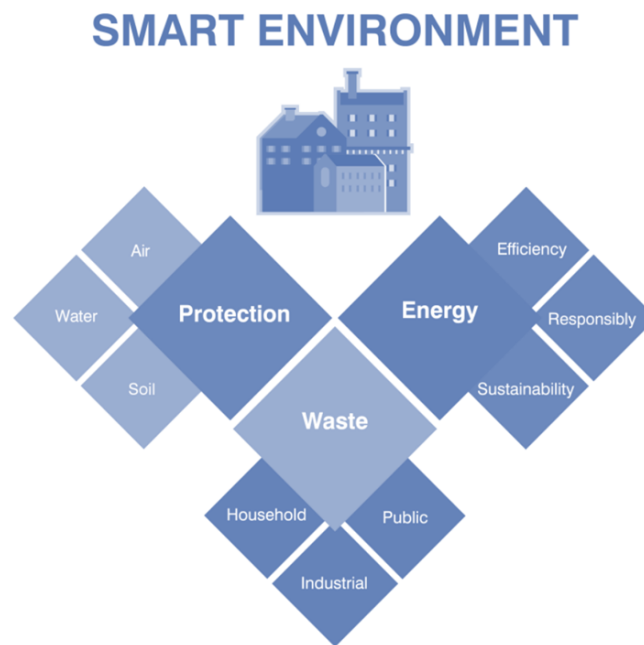


Gambar 1. 8 Smart Society

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

6. *Smart Environment*

Dimensi keenam dalam sebuah *Smart City* adalah pengelolaan lingkungan yang pintar, dimana yang dimaksud dengan pintar adalah adanya perhatian bagi lingkungan hidup *dalam* pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Ide dasar dari *Smart Environment* di dalam Kota Cerdas (*Smart City*) adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang Kota Cerdas (*Smart City*) yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya.



Gambar 1. 9
Smart Environment

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

BAB II

VISI SMART CITY KOTA BANJARBARU

A. Visi Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Banjarbaru

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap III RPJPD Kota Banjarbaru. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 maka visi Kota Banjarbaru adalah

**“TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA EMPAT DIMENSI
YANG MANDIRI DAN TERDEPAN”.**

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Visi Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, yaitu :

**“TERWUJUDNYA BANJARBARU
SEBAGAI KOTA PELAYANAN YANG BERKARAKTER”**

KOTA PELAYANAN adalah Kota yang memberikan pelayanan secara optimal kepada warga masyarakat dan yang berkunjung di Kota Banjarbaru.

BERKARAKTER Terdiri Atas Dua Aspek Penting Yaitu :

1. Sumber daya manusia yang berkarakter, yaitu terciptanya sumber daya manusia yang sehat, mempunyai etos kerja tinggi dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai religius.
2. Kota yang berkarakter, yaitu sebuah kota yang mempunyai ciri khas sebagai kota yang tertata/direncanakan (urban design) sehingga menjadi tempat hunian yang indah, aman dan nyaman yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan visi yang telah ada di dalam rencana pembangunan tersebut, maka Visi Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Banjarbaru adalah:

**“TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI PINTU GERBANG IDAMAN
(berINOVASI, berDAYA SAING, AMAN dan NYAMAN) KALIMANTAN SELATAN”**

Penjabaran visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- **Banjarbaru Kota Cerdas (*Smart City*)** adalah keadaan Kota Banjarbaru yang dalam pengembangan dan pengelolaannya menerapkan inovasi yang berkesinambungan dengan memperhatikan keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan.
- **Banjarbaru sebagai pintu gerbang idaman (berinovasi, berdaya saing, aman dan nyaman)** Kalimantan Selatan adalah merupakan pintu atau wilayah pertama yang harus dilalui bagi orang yang pertama kali ke Kalimantan Selatan baik melalui jalur udara maupun jalur darat, sehingga sebagai pintu gerbang harus mempunyai fungsi publik, fungsi rekreatif, dan fungsi informatif. Selain itu itu, yang utama dari Kota Banjarbaru adalah inovasi yang dilakukan secara bersama sama antara pemerintah...

pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Juga daya saing yang dimiliki, Banjarbaru mampu bersaing dengan daerah lain dengan modal IPM tertinggi di Kalsel. Pun demikian dengan keadaan kota yang aman, stabilitas politik yang terjaga, toleransi suku suku yang hidup di Banjarbaru juga berjalan baik, dan keadaan kota yang nyaman karena tertata, relatif tidak semrawut.

B. Misi Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Banjarbaru

Misi Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Banjarbaru disusun berdasarkan 6 (enam) dimensi Kota Cerdas (*Smart City*) yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi yang terintegrasi (*Smart Governance*)
2. Mewujudkan penataan kota yang rapi dan indah untuk menguatkan image kota Banjarbaru sebagai kota masa depan Kalimantan Selatan (*Smart Branding*)
3. Mewujudkan perekonomian kreatif dan ekosistemnya yang saling mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*Smart Economy*)
4. Mewujudkan tatanan kehidupan warga yang aman, sehat dan nyaman (*Smart Living*)
5. Mewujudkan masyarakat yang humanis, produktif, interaktif dan tangguh dalam menghadapi bencana (*smart society*)
6. Mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan (*Smart Environment*).

Misi yang ditetapkan oleh pemerintah kota Banjarbaru mengandung 5 daya yaitu daya dukung, daya tarik, daya cipta, daya ubah, daya tahan. Daya dukung berarti kekuatan/kemampuan dari misi yang ditetapkan akan mendapat dukungan dari banyak pihak. Daya Tarik memperlihatkan kekuatan / kemampuan dari misi yang ditetapkan dapat menarik perhatian orang. Daya cipta mengarah pada kekuatan/kemampuan dari misi yang ditetapkan memotivasi banyak pihak untuk berkreasi/berinovasi. Daya ubah merupakan kekuatan/kemampuan dari misi yang ditetapkan diharapkan mampu mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik dan Daya tahan yang berarti kekuatan/kemampuan dari misi yang ditetapkan dapat konsisten dan *sustainable*

C. Sasaran Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Banjarbaru

Dari Misi Kota Cerdas (*Smart City*) yang ditetapkan maka sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Banjarbaru dapat dijelaskan sesuai ke-6 Dimensi Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Banjarbaru.

1. *Smart Governance...*

1. *Smart Governance*

Adapun sasaran target pembangunan *Smart Governance* ini sesuai tujuannya adalah:

a. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik

- Melaksanakan kerjasama dan inovasi layanan kependudukan dan catatan Sipil
- Mewujudkan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal
- Meningkatnya konektivitas penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK
- Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK
- Menjadikan identitas kependudukan (NIK) sebagai basis data dalam pelayanan Publik
- Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk

b. Meningkatkan Kinerja Birokrasi Pemerintah

- Meningkatnya kualitas layanan informasi public
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan
- Meningkatnya kualitas pengelolaan pegawai

2. *Smart Branding*

Adapun sasaran target pembangunan *Smart Branding* sesuai tujuan adalah:

a. Membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (tourism branding)

- Meningkatnya keselarasan RPJMD dengan Renstra SKPD dalam rangka penyusunan RIPARDA
- Mengembangkan Kemitraan dan kelembagaan kepariwisataan
- Peningkatan pemanfaatan saluran media komunikasi publik
- Meningkatnya jumlah keragaman seni dan budaya yang dilestarikan

b. Membangun dan memasarkan wajah kota (city appearance branding)

- Mengembangkan Destinasi Pariwisata
- Meningkatnya kunjungan wisatawan
- Meningkatnya kualitas taman di kota Banjarbaru
- Meningkatnya kualitas jumlah RTH public
- Meningkatnya realisasi investasi daerah
- Memperkuat dan mengukuhkan wisata kampung tematik seperti Kampung Pelangi, Kampung Pejabat, kampung purun, Kampung iwak dan kampung sayuran.

Membangun...

- Membangun dan mengembangkan sistem penampilan informasi destinasi wisata Kota Banjarbaru dengan narasi singkat yang berbasis teknologi

3. *Smart Economy*

Adapun sasaran target pembangunan *Smart Economy* sesuai tujuan adalah:

a. Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (*industry*)

- Meningkatnya UMKM yang mendapat akses perluasan pasar
- Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan IKM
- Meningkatnya Jumlah UMKM baru
- Mengembangkan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM dan mempermudah akses UKM uk mendapatkan permodalan
- Meningkatnya koperasi yang aktif
- Menciptakan iklim usaha kecil dan menengah dan iklim investasi yang kondusif

b. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (*Welfare*)

- Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap
- Meningkatkan Produksi pangan
- Terjaganya produk pangan segar peternakan
- Meningkatnya Akses Informasi Teknologi Pertanian
- Meningkatnya informasi ketersediaan pangan
- Meningkatnya Kelas Kelompok Tani

c. Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan (*Transaction*)

- Meningkatkan klasifikasi pasar rakyat yang di kelola secara modern
- Meningkatnya Wajib Pajak yang telah membayar Pajak
- Meningkatkan kepatuhan para pedagang terhadap kewajiban pembayaran retribusi
- Meningkatkan sumber-sumber PAD uk kesejahteraan masyarakat

4. *Smart Living*

Adapun sasaran target pembangunan *Smart Living* sesuai tujuan adalah:

a. Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (*Harmony*)

- Terwujudnya tertib perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- Meningkatnya Konektivitas antar pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota
- Meningkatnya sistem drainase dalam kondisi baik
- Terwujudnya infrastruktur air minum yang berkualitas dan merata
- Menurunnya rumah tidak layak huni
- Mewujudkan tertib perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten
- Melaksanakan konsep aerocity

b. Meningkatkan...

b. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat (*Health*)

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Bidang Penunjang
- Meningkatkan Kualitas dan efektifitas Manajemen RS
- Terlaksananya Puskesmas dan jejaring kesehatan yang melaksanakan sistem informasi kesehatan
- Tercapainya TPM yang memenuhi syarat kesehatan
- Meningkatnya jumlah sarana prasarana puskesmas sesuai standar
- Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan (9 profesi kesehatan) yang sesuai dengan kompetensi
- Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan
- Meningkatnya Pelayanan Program JKN di Puskesmas
- Meningkatnya sarana prasarana Puskesmas
- terpeliharanya kebersihan rumah sakit yang berrkelanjutan
- Meningkatkan sarana prasarana Olahraga

c. Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (*Mobility*)

- Meningkatnya kelancaran lalu lintas angkutan jalan
- Meningkatnya penggunaan angkutan pelajar gratis
- Terlaksananya penanganan penyebab kemacetan

5. Smart Society

Adapun sasaran target pembangunan *smart Society* sesuai tujuan adalah:

a. Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien (*Community*)

- Meningkatnya Kreatifitas anak PAUD
- Meningkatnya kreatifitas Siswa SD, SMP
- Peningkatan Kinerja kelompok/mitra kependudukan
- pemenuhan papan penyandang disabilitas
- Peningkatan jaringan intra Pemerintah Kota Banjarbaru
- Peningkatan Kinerja kelompok Swadaya Masyarakat

b. Membangun Ekosistem Budaya Belajar (*Learning Culture*)

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah
- Peningkatan Peran serta Kelompok Masyarakat dalam membangun pemberdayaan masyarakat
- Peningkatan prasarana SD dan SMP sesuai Standar
- Meningkatnya kemampuan akademi Siswa SD, SMP dan Pendidikan Non Formal
- Meningkatnya Kreatifitas Siswa kualitas pendidikan SD, SMP dan PAUD
- Meningkatkan Jumlah Layanan Perpustakaan

c. Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat (*Security*)

- Meningkatnya Pengamanan Kegiatan Insidentil
- Peningkatan jaringan intra Pemerintah Kota Banjarbaru
- Peningkatan pelayanan publik dalam hal trantib

terciptanya...

- terciptanya ketertiban umum dan ketentraman
- Mewujudkan suatu sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan alat kelengkapan pemerintah maupun teknologi sensor digital atau Internet of Thing (IoT) (LAPOR)
- Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan Bencana

6. *Smart Environment*

Adapun sasaran target pembangunan *smart Enviroment* sesuai tujuan adalah:

a. Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan (*Protection*)

- Mewujudkan infrastruktur air minum dan air limbah yang berkualitas dan merata
- terselesaikannya permasalahan banjir dan genangan
- terkendalinya dampak perubahan iklim
- Terjaganya tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui masyarakat peduli lingkungan
- Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi
- Terselesaikannya Permasalahan Daerah Rawan Banjir
- Terwujudnya infrastruktur air limbah yang berkualitas dan merata
- Meningkatnya kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu

b. Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah (*Waste*)

- Meningkatnya manajemen pengelolaan sampah
- Meningkatkan Kualitas Kebersihan Lingkungan
- Meningkatnya manajemen pengelolaan sampah
- Meningkatnya Tonase Sampah yang Dikelola Secara 3R

c. Mengembangkan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung-jawab (*Energy*)

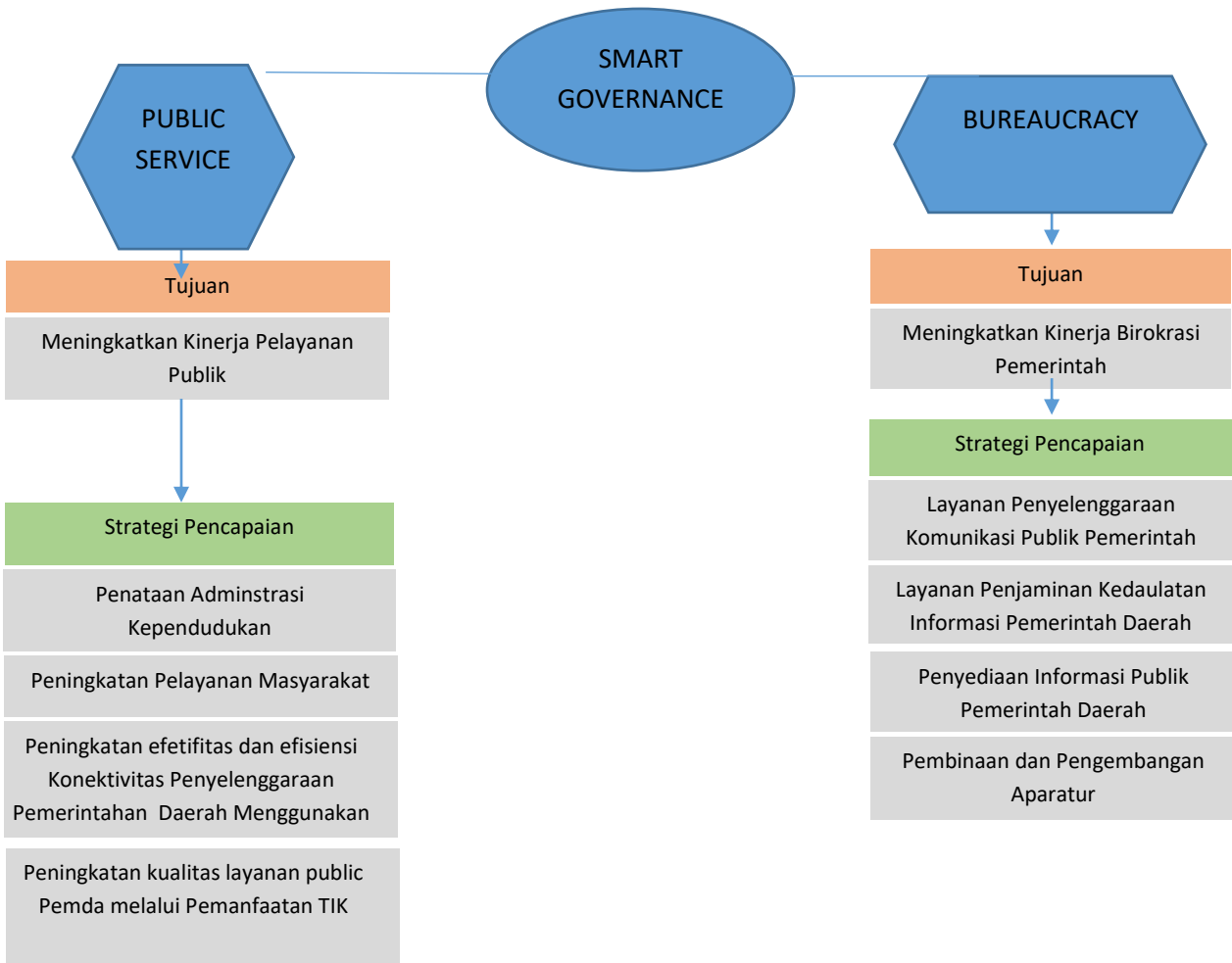
Pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan (*environmentally friendly*) dan berkelanjutan (*sustainable*) serta terjangkau bagi masyarakat. Misalnya pemanfaatan limbah/sampah dan Tahu sebagai biogas, energi surya, dan lain-lain.

BAB III

STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA CERDAS (*SMART CITY*)

A. Strategi Dimensi *Smart Governance*

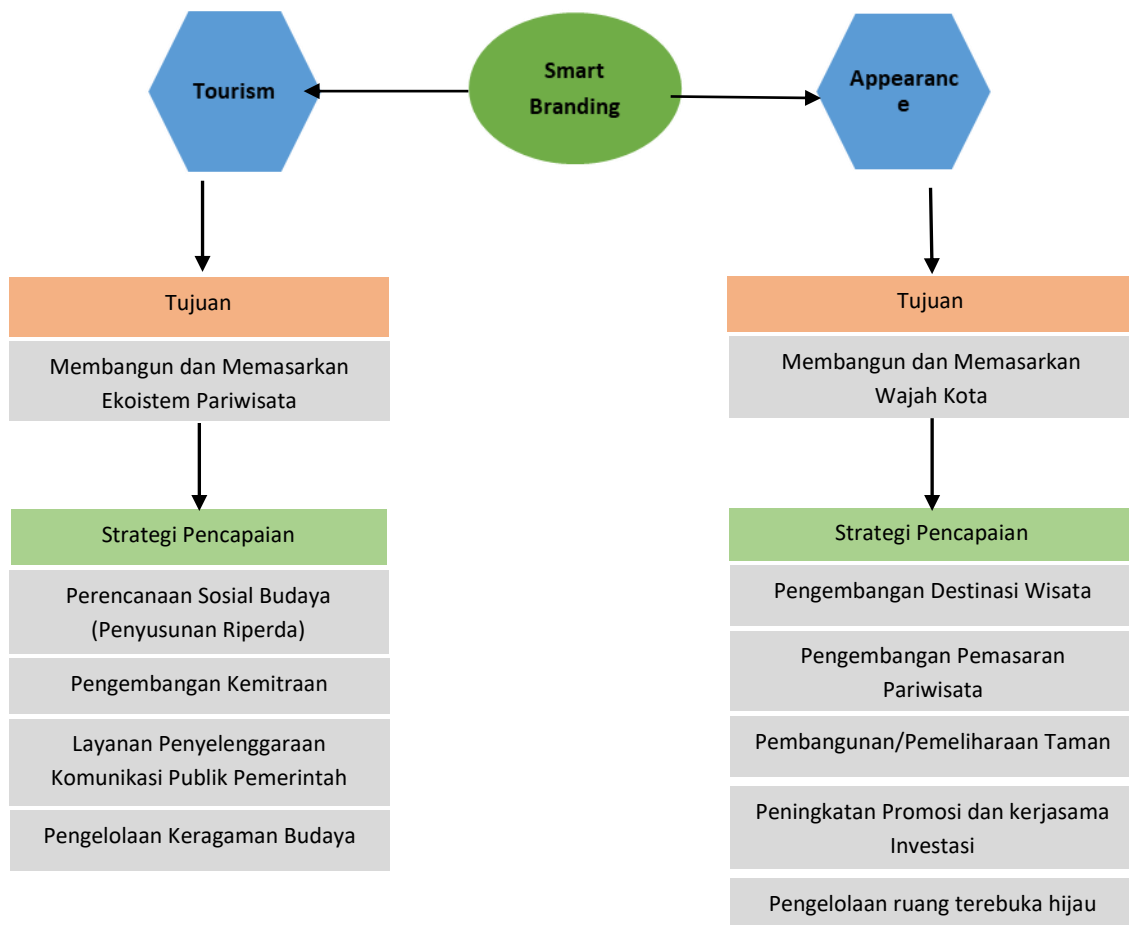
Guna mewujudkan Tujuan dan sasaran Kota Cerdas (*Smart City*) pada dimensi *Smart Governance* maka disusunlah strategi pembangunan sebagaimana diagram berikut ini :



Gambar 3. 1 Pembangunan Smart Governance

B. Strategi Dimensi Smart Branding

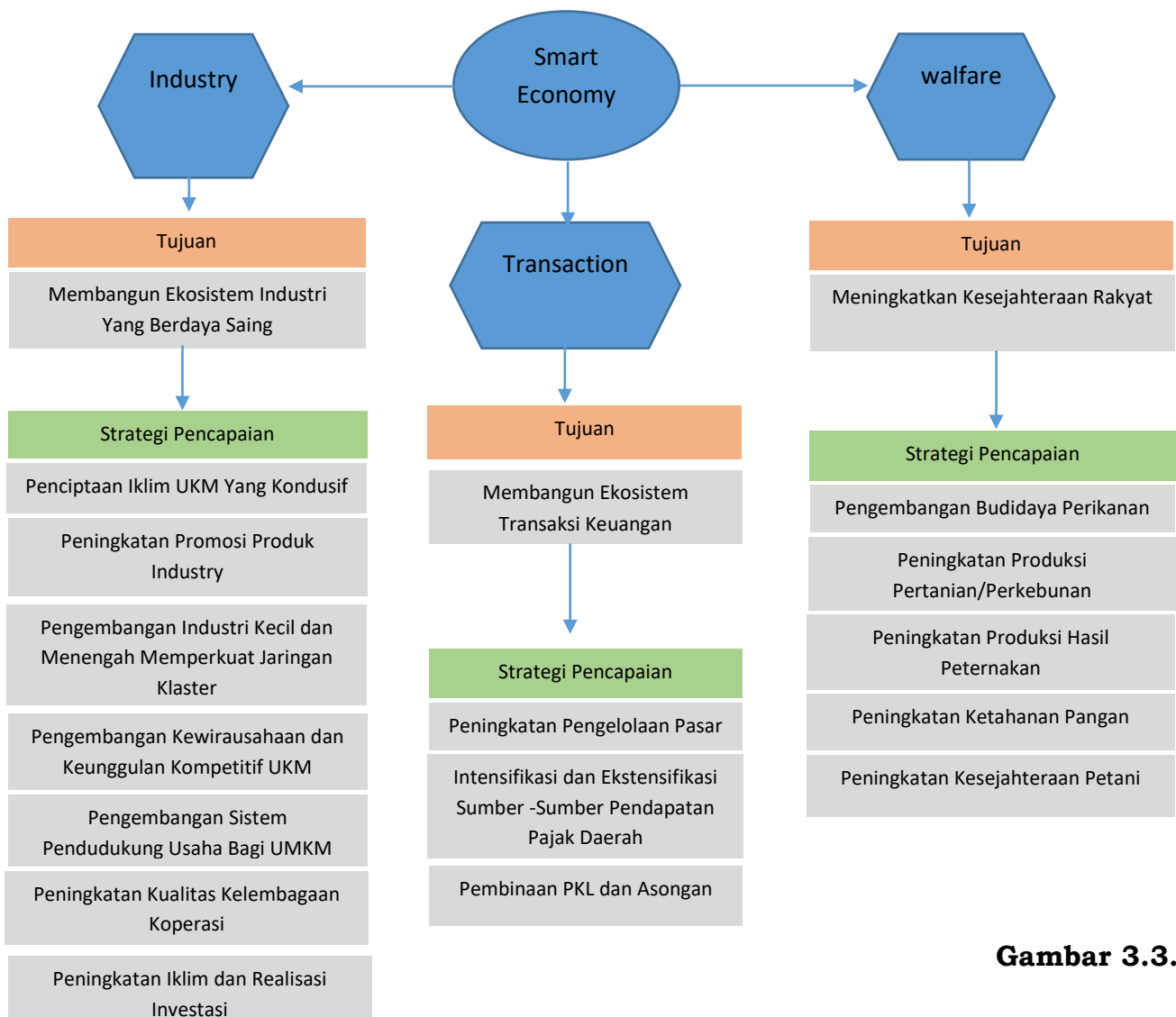
Guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kota Cerdas (*Smart City*) pada dimensi *Smart Branding* maka disusunlah strategi pembangunan sebagaimana diagram berikut ini:



Gambar 3. 2 Pembangunan *Smart Branding*

C. Strategi Dimensi Smart Economy

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kota Cerdas (*Smart City*) pada dimensi *Smart Economy* maka disusun strategi pembangunan sebagaimana diagram berikut ini:

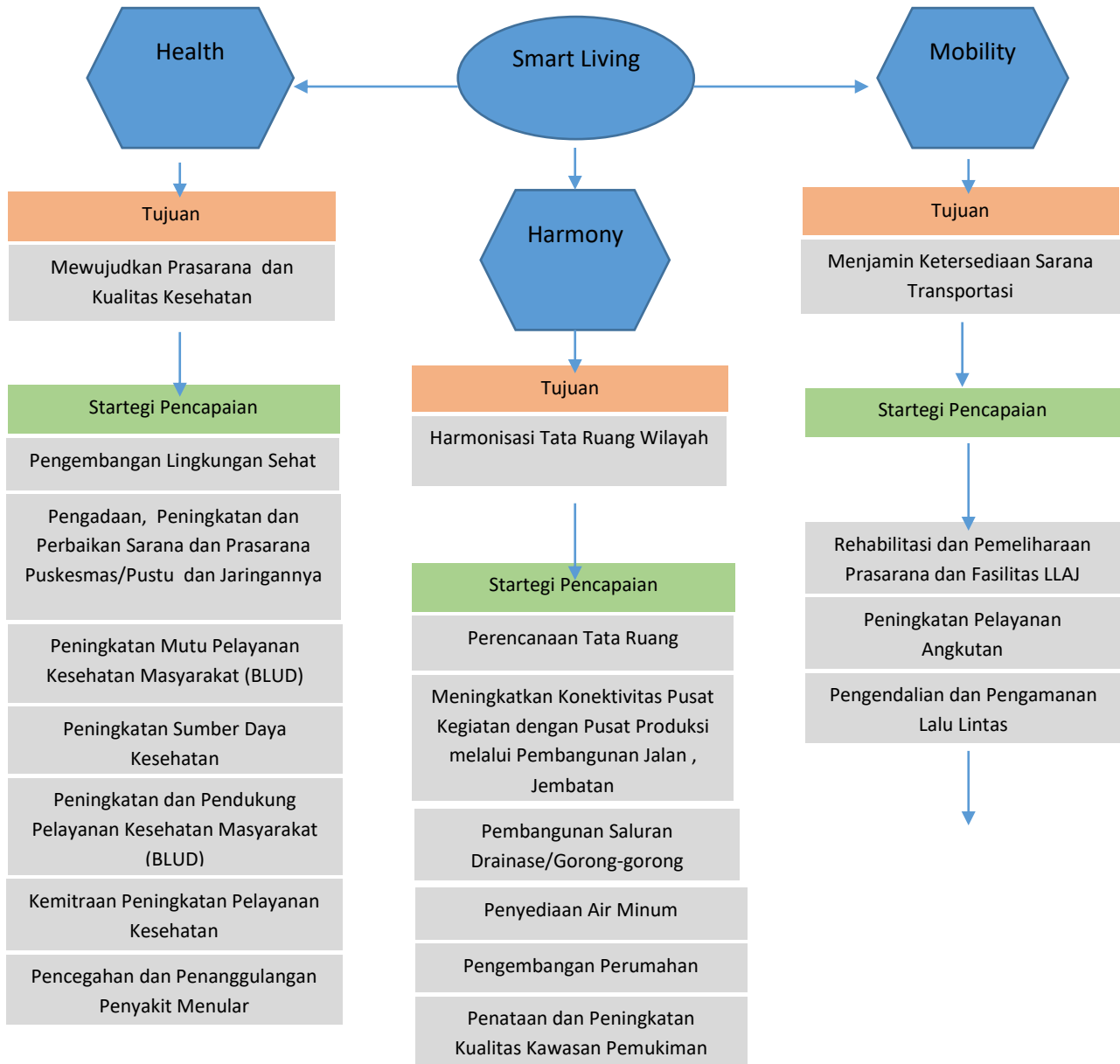


Gambar 3.3...

Gambar 3. 3 Pembangunan Smart Economy

D. Strategi Dimensi Smart Living

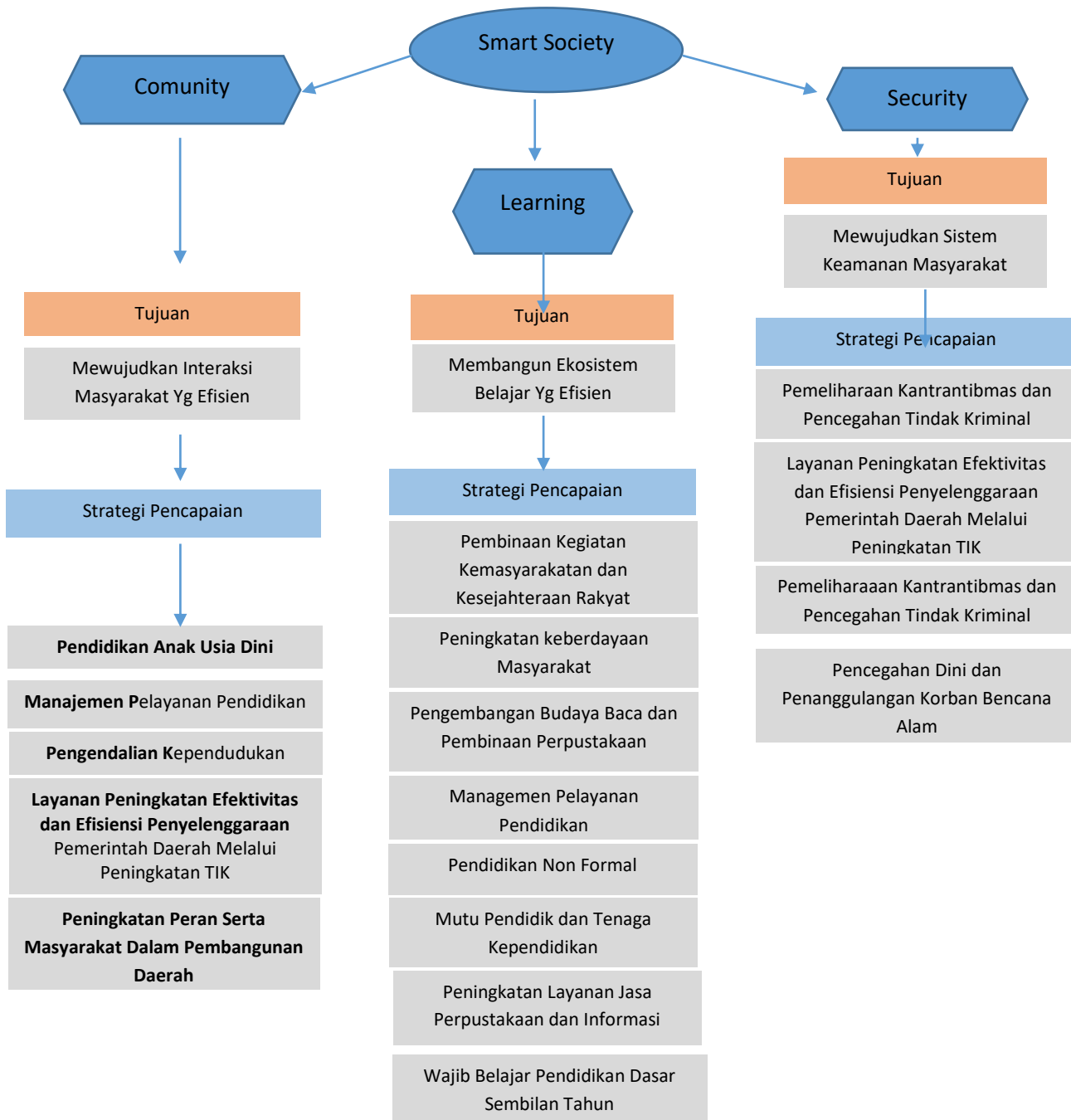
Guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kota Cerdas (*Smart City*) pada dimensi *Smart Living* maka disusun strategi pembangunan sebagaimana diagram berikut ini:



Gambar 3. 4 Pembangunan Smart Living

E. Strategi Dimensi Smart Society

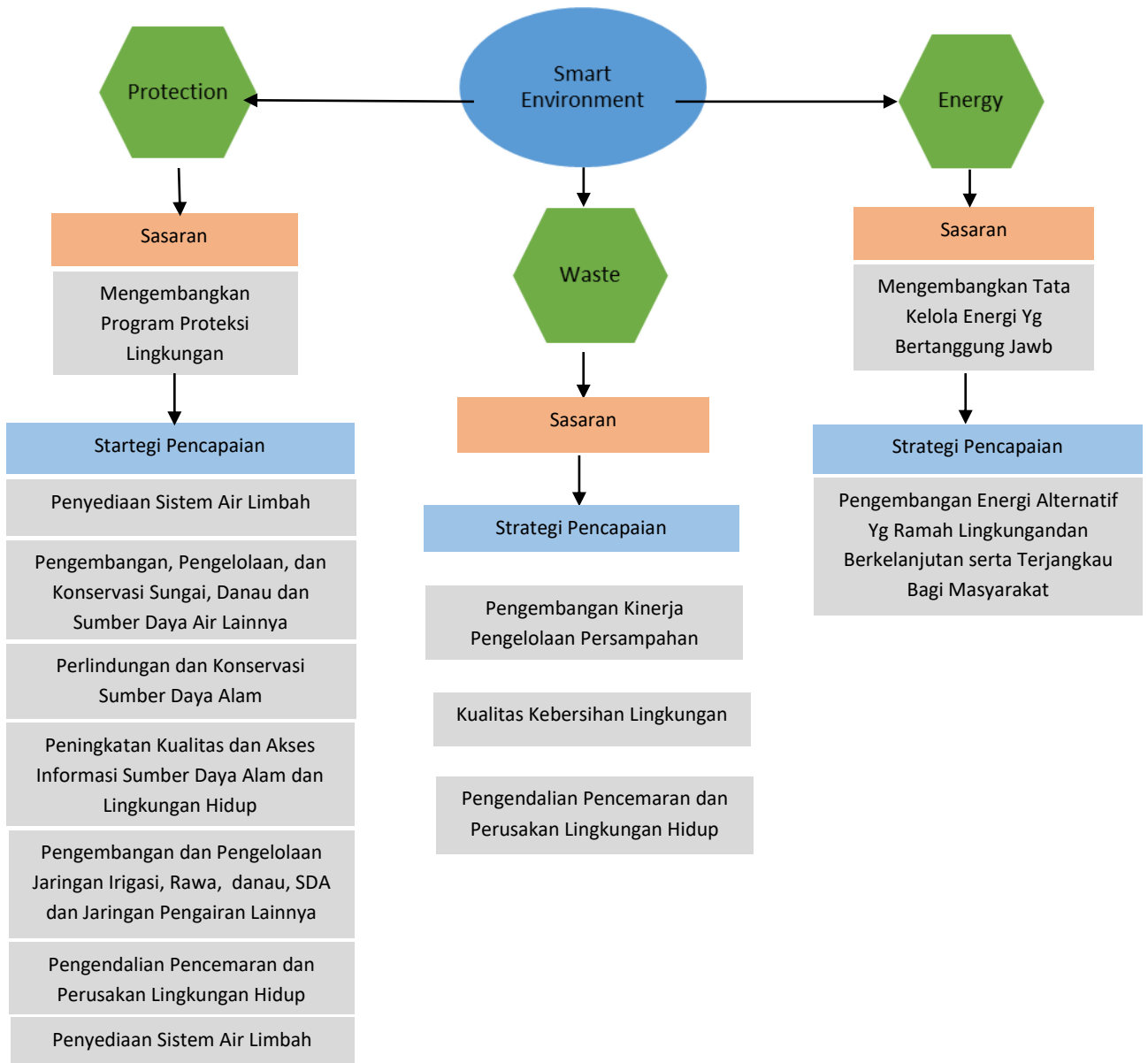
Guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kota Cerdas (*Smart City*) pada dimensi Smart Society maka disusun strategi pembangunan sebagaimana diagram berikut ini :



Gambar 3. 5 Pembangunan Smart Society

F. Smart Environment

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kota Cerdas (*Smart City*) pada dimensi *Smart Environment* maka disusun strategi pembangunan sebagaimana diagram berikut ini :



Gambar 3. 6 Pembangunan Smart Enviroment

BAB IV
RENCANA KOTA CERDAS (*SMART CITY*) KOTA BANJARBARU

A. Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan Kota Cerdas (*Smart City*)

Daerah

1. Kebijakan

Proses implementasikan Kota Cerdas (*Smart City*) , Kota Banjarbaru menyiapkan Regulasi dan Dokumen Perencanaan, landasan kebijakan ini merupakan dasaran dalam pengembangan dan implementasi Kota Cerdas (*Smart City*) di Kota Banjarbaru. Selain itu evaluasi dimensi kebijakan dilakukan dalam bentuk nyata pada dokumen-dokumen resmi yang memiliki kekuatas legal. Dokumen-dokumen tersebut berisi antara lain penentuan dan penetapan dari arah/tujuan, program kerja, tata cara atau pengaturan bagi pengembangan dan implementasi *Smart City* Kota Banjarbaru. Bentuk dokumen dapat berupa surat keputusan, peraturan, pedoman atau bentuk dokumen resmi lainnya.

1. Sistem Informasi Nasional-Kerangka Konseptual (November 2002), Kementerian Komunikasi dan Informasi & Universitas Indonesia
2. Keputusan Presiden No.9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia
3. Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*
 - Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Lembaga
 - Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah
 - Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik
4. Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
5. Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (memulai KTP Elektronik)
6. Cetak Biru Sistem Aplikasi *e-Government* bagi Pemerintah Pusat dan Daerah (Departemen Komunikasi dan Informatika,2006)
7. Keputusan Presiden Republik ndonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi Komunikasi Nasional
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Menkominfo selaku Ketua Harian Dewan TIK Nasional)
9. Peraturan Presiden No.10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*
10. Undang Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

11. Undang Undang...

11. Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
12. Undang Undang No.39 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan Sistem Informasi Kearsipan Statis
14. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.18 Tahun 2012 tentang *E-Tendering*
15. Undang Undang No.4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
16. Peraturan Menteri Pertahanan No.38 Tahun 2011 tentang Kebijakan Sistem Informasi Pertahanan
17. Kebijakan dan Strategi Pengembangan *e-Government* (Kementerian Komunikasi dan Informatika,2012)
18. Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Sistem Transaksi Elektronik
19. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun2014 tentang Dewan Teknologi Informasi Komunikasi Nasional
21. Peraturan Presiden No.96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019
22. Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (salah satunya mengatur tentang Keputusan Pejabat/Badan Pemerintah dalam bentuk Elektronik)
23. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 002 Tahun 2011 tentang Panduan Prakarsa Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
24. Inpres No 3 tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*.
25. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi No 57 tahun 2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *E-government* Lembaga.
26. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.
28. Peraturan Daerah...

28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat.
29. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 73 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Berkarakter.
30. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri di Kota Banjarbaru
31. Peraturan Daerah Banjarbaru No. 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
32. Peraturan Walikota Banjarbaru 85 Tahun 2017 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
33. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/278/KUM/2018 Tentang Tim Pelaksana *Smart City* Banjarbaru.
34. Nota Kesepahaman Antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Dengan Pemerintah kota Banjarbaru Nomor 22/KOMINFO/HK.03.02/05/2018 dan Nomor 33/MOU/KUM/2018 Tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 *Smart City* Kota Banjarbaru.
35. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/277/KUM/2018 Tentang Dewan *Smart City* Banjarbaru.
36. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/278/KUM/2018 Tentang Tim Pelaksana *Smart City* Kota Banjarbaru.
37. Master Plan TIK 2017.

Semua regulasi yang telah disebut diatas adalah landasan hukum implementasi kota cerdas (*Smart City*) Banjarbaru. Regulasi lain yang belum ditetapkan secara nasional akan diatur secara internal. Selain itu juga perlu diatur mengenai mekanisme, SOP mengenai tata cara pemanfaatan data atau berbagi pakai data dari seluruh sistem di Kota Cerdas (*Smart City*) Banjarbaru.

Beberapa yang diperlukan dilakukan dalam regulasi *Smart City* Banjarbaru yaitu :

1. Penyusunan regulasi Rencana Induk Kota Cerdas (*Masterplan Smart City*) Banjarbaru
2. Penyusunan SOP Pengelolaan Aplikasi dan Perangkat Lunak Kota Cerdas (*Smart City*) Banjarbaru.
3. Penyusunan SOP Pengelolaan Sarana dan Prasarana TIK
4. Penyusunan SOP Pengelolaan *Data Center*

2. Kelembagaan

Kelembagaan yang dikembangkan dalam mendukung implementasi Kota Cerdas (*Smart City*) Banjarbaru yaitu untuk mendukung kepemimpinan kota cerdas (*Smart City*) Banjarbaru yang memiliki tugas memimpin organisasi pengelola yakni mengkoordinasi perencanaan, realisasi, operasional harian, dan evaluasi internal seluruh kegiatan implementasi kota cerdas (*Smart City*) Banjarbaru. Dimensi kelembagaan berkaitan erat dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan TIK dalam Kota Cerdas (*Smart City*) Banjarbaru. Adanya organisasi struktural yang lengkap sehingga dapat menjalankan fungsi tata kelola TIK, pengembangan, pengoperasian, penyediaan layanan TIK dan fungsi-fungsi lain dengan baik beserta dokumen yang memberikan rumusan yang jelas mengenai Tugas dan Fungsi. Kelembagaan kota cerdas (*Smart City*) Banjarbaru yaitu :

1. Pembentukan Dewan Kota Cerdas (*Smart City*) Banjarbaru, yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pengarah perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi *Smart City* Banjarbaru.
2. Pembentukan Kelompok Kerja Kota Cerdas (*Smart City*) Banjarbaru, yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pendukung teknis pelaksanaan Kota Cerdas (*Smart City*) Banjarbaru.

B. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kota Cerdas (*Smart City*)

Dalam mengimplementasikan Kota Cerdas (*Smart City*) Banjarbaru, maka direncanakan pembangunan infrastruktur pendukung Kota Cerdas (*Smart City*) Banjarbaru, yaitu:

1. Penyediaan *Network Operation Control* (NOC)
2. Penyediaan jaringan *backbone* menggunakan *fiber optic*
3. Penyediaan pusat data (*data center*)
4. Penyediaan *data recovery center* (DRC)
5. Penyediaan koneksi internet

Kebutuhan komunikasi data diperkirakan akan semakin besar di masa depan. Peningkatan ini juga didorong oleh semakin baiknya integrasi dan interoperabilitas aplikasi antara SKPD, UPT, dengan Kecamatan/Kelurahan, Provinsi, Kementerian/ Lembaga Pusat. Selain itu dengan implementasi kota cerdas (*Smart City*) Banjarbaru maka kebutuhan akan komunikasi data akan terus meningkat. Pengembangan Kota Cerdas (*Smart City*) Banjarbaru memerlukan infrastruktur ICT yang handal dan reliable. Beberapa aspek-aspek yang harus diperhatikan tersebut antara lain:

1. Kinerja (*Performance*)...

1. Kinerja (*Performance*)

Bandwidth jaringan dirancang untuk mampu melayani user (pemakai) yang semakin berkembang, baik jumlah user-nya maupun jenis aplikasi-aplikasi yang disediakan-nya.

2. Keamanan (*Security*)

Jaringan harus dilengkapi dengan sistem keamanan data dan sistem untuk mencegah pihak-pihak yang tidak memiliki otoritas dapat mengakses ke dalam jaringan Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan cara mengimplementasikan kebijakan dan prosedur atau tata-cara akses data/informasi yang tersedia.

3. *Manageable*

Dengan menerapkan sistem manajemen jaringan terpusat di *backbone* utama maka pengelolaan jaringan mudah dioperasikan/dikendalikan dari pusat.

4. *Scalable*

Jaringan Pemerintah Kota Banjarbaru dapat dikembangkan ke jaringan yang lebih luas tanpa harus mengganggu atau mengubah jaringan yang sudah ada.

5. *Upgradeable*

Teknologi jaringan dapat ditingkatkan sesuai dengan perkembangan teknologi jaringan ke teknologi yang lebih tinggi dengan efektif dan efisien.

Penyediaan Pusat Operasional Jaringan dan Pusat Data perlu diperhatikan dalam peningkatan pelayanan dalam rangka implementasi *Smart City* Banjarbaru. Spesifikasi ruangan atau tempat yang dijadikan Pusat Operasional Jaringan (*Network Operation Center*) mirip dengan Pusat Data (*Data Center*). Perbedaan antara keduanya adalah perangkat yang terletak di dalamnya. Jika Pusat Data berisi server-server, maka Pusat Operasi Jaringan berisi berbagai perangkat aktif jaringan (*Network Devices*).

Faktor penentu pengembangan suatu arsitektur server adalah sebagai berikut :

1. *High availability*

Ketersediaan (*availability*) suatu perangkat server ditentukan oleh : *High levels of service availability*. Tingkat ketersediaan suatu server dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan komponen-komponennya seperti : *operating system, processor, memory, bus, DAS storage, expansion slots*, dan lain-lain. Selain itu *Increased reliability* yaitu tingkat reliabilitas server juga dipengaruhi reliabilitas komponen-komponennya.

2. *Security*

Ancaman serangan terhadap infrastruktur dapat berupa secara fisik dan non fisik. Infrastruktur yang rentan terhadap serangan dapat disebut dengan *critical infrastructure* (infrastruktur kritis). Serangan keamanan

System informasi...

sistem informasi yang bersifat tidak langsung, seperti; *virus, worms, malware* dan lain sebagainya dalam wujud kode-kode perangkat lunak yang disampaikan melalui jaringan internet nasional terhadap infrastruktur nasional akan berdampak seperti serangan keamanan secara fisik. Hal ini disebabkan oleh karena informasi merupakan asset yang sangat berharga bagi

Untuk mengantisipasi adanya serangan keamanan sistem informasi, perlu ditingkatkan kesadaran akan keamanan informasi dan juga dibutuhkan adanya tata kelola keamanan sistem informasi yang baik di tingkat nasional. Tanpa adanya kesadaran dan tata kelola keamanan sistem informasi yang tepat sangat sulit bagi sebuah negara untuk mengantisipasi serangan-serangan keamanan informasi nasional. Organisasi dan tata kelola ini adalah sebagai wujud kepemimpinan yang akan memiliki peran penting untuk melakukan koordinasi antar lembaga terkait. Dalam organisasi tersebut, harus diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dari berbagai bidang khususnya kemampuan teknis dibidang keamanan informasi dan juga kemampuan manajerial serta kepemimpinan (*leadership*) yang baik.

Perlu adanya suatu proses dan manajemen yang mengatur Keamanan Informasi. Prosedur dan pengelolaan yang efektif untuk menjaga keamanan informasi. Keamanan informasi membutuhkan pengelolaan terhadap nilai aset informasi, serta kerentanannya terhadap adanya berbagai ancaman. Pengelolaan aset informasi terhadap ancaman dan kerentanannya lazim disebut manajemen risiko. Metode manajemen risiko sebagai berikut:

- a. Metode Pengurangan Risiko – metode ini dilakukan ketika kemungkinan ancaman/kerentanan tinggi tetapi dampaknya rendah.
- b. Metode Penerimaan Risiko – metode ini dilakukan ketika kemungkinan ancaman/kerentanan rendah dan dampaknya kecil atau dapat diterima.
- c. Metode Pemindahan Risiko – Jika risiko sangat tinggi atau organisasi tidak mampu mempersiapkan kendali yang diperlukan, risiko dapat dipindahkan keluar dari organisasi.
- d. Metode Penghindaran Risiko – Jika ancaman dan kerentanan sangat mungkin terjadi dan dampaknya juga sangat tinggi, lebih baik menghindari risiko dengan misalnya melakukan alih daya perangkat pemrosesan data dan juga staf.

Risiko keamanan informasi berbanding lurus dengan nilai aset informasi, ancaman dan kerentanan. Jadi, risiko dapat meningkat atau berkurang dengan cara memanipulasi besar atau *kecilnya* ancaman dan kerentanan yang mempengaruhi nilai aset informasi. Hal ini dapat dilakukan dengan manajemen risiko.

3. Scalability

Kemampuan *scalability* suatu perangkat server ditentukan oleh : *Flexibility to cope with changing demands* suatu server harus mampu mengatasi perubahan kebutuhan layanan server, seperti mampu melakukan skalabilitas terhadap peningkatan layanan akses data pada server.

4. Manageability

Kemampuan (*manageability*) suatu perangkat server ditentukan oleh : Complete management solutions. Server harus memiliki solusi end-to-end manajemen yang terintegrasi yang bekerja secara holistik (menyeluruh) sesuai kebutuhan.

Solution-wide service level agreements (SLAs), server mampu dikelola untuk beragam kebutuhan SLA. *Service delivery strategies*, server mampu dikelola berdasarkan strategi *output services* yang dikehendaki oleh aplikasi-aplikasi yang menggunakannya.

5. Consolidation/Virtualization

Suatu perangkat server yang baik dapat menyediakan tingkat konsolidasi dan/atau virtualisasi yang bisa ditentukan oleh *virtualization software support*. Server juga harus memiliki *software* yang mendukung *consolidation dan virtualization seperti operating system, tools, dan utilities*. *Resources abstraction level*, server harus mendukung abstraksi penggunaan sumber daya server (seperti CPU power, memory, dll) untuk kebutuhan dari sistem operasi, services dan aplikasi pada saat yang bersamaan.

6. Affordability

Kemampuan *affordability* (ketercapaian) suatu perangkat server ditentukan oleh consolidated server and other assets. Server dan beragam aset teknologi (seperti *storage, network*, dan lain-lain) dari beragam lokasi geografis harus mampu terkonsolidasi menjadi server dan aset yang lebih sedikit secara fisik dan logis. Controlled total cost of ownership (TCO), seluruh aspek biaya dalam penyelenggaraan server harus terkendali, seperti (biaya akuisisi, lisensi HW dan SW, training, konsultasi, dan lain-lain).

C. Rencana Pengembangan Aplikasi Dan Perangkat Lunak Pendukung Kota Cerdas (Smart City)

Saat ini cukup banyak aplikasi/sistem informasi yang digunakan oleh seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru. Beberapa sistem informasi merupakan sistem yang memang diberikan dari pusat sebagai alat bantu koordinasi, administrasi dan monitoring kinerja pemerintah daerah. Aplikasi ini digunakan di beberapa SKPD sesuai dengan tupoksi masing-masing. Selain aplikasi untuk kebutuhan administrasi, monitoring dan evaluasi di atas, terdapat juga beberapa aplikasi untuk mendukung operasional layanan.

Setiap aplikasi...

Setiap aplikasi dan perangkat lunak menuju pada sasaran atau target luaran yang harus dicapai dalam servis layanan TIK. Domain yang terkait dengan penyediaan layanan (tataran taktis) adalah:

1. *Service Level Management* (SLM): mendefinisikan tingkat *Service Level Agreement* (SLA) yang disepakati dan menjamin bahwa kesepakatan tersebut dapat dipenuhi.
2. *Capacity management* : menjamin bahwa kapasitas layanan TIK dan infrastruktur TIK mampu melayani *service level* yang dijanjikan, dengan biaya yang optimal dan tepat waktu.
3. *IT Service Continuity Management* : mengelola resiko yang dapat mempengaruhi layanan TIK, sehingga sistem dapat menyediakan layanan dalam kondisi paling minimum jika terjadi gangguan dan mampu melakukan recovery jika terjadi masalah.
4. *Availability Management*: mendefinisikan, analisis dan perencanaan, pengukuran dan peningkatan semua aspek terkait ketersediaan layanan TIK
5. *Manajemen Finansial* : mengelola anggaran penyediaan layanan TIK.

Informasi adalah sebuah aset yang sama pentingnya seperti aset-aset lainnya, memiliki nilai terhadap sebuah organisasi sehingga membutuhkan keamanan yang memadai. Setiap aplikasi dan perangkat lunak tentu memiliki informasi di dalamnya, sehingga perlu diperhatikan tentang keamanan informasi yang dihasilkan oleh aplikais dan perangkat lunak. Keamanan informasi memiliki empat komponen, yaitu:

1. Kerahasiaan, melindungi informasi yang sensitif terhadap penggunaan yang tidak memiliki kewenangan
2. Integritas, menjaga keakuratan dan kelengkapan informasi/data
3. Ketersediaan, menjamin informasi dan jasa ikutannya tersedia ketika dibutuhkan
4. Tidak dapat disangkal, menjamin bahwa informasi merupakan transaksi yang tidak dapat ditolak oleh berbagai pihak.

Oleh karena itu, diperlukan sistem untuk keamanan informasi. Saat ini ada beberapa standar yang dapat digunakan untuk menerapkan sistem manajemen keamanan informasi, antara lain COBIT, ITIL, ISO 27000 dan standar lainnya. Standar ISO 27000 merupakan standar yang paling banyak digunakan dalam penerapan sistem manajemen keamanan informasi.

Standar sistem manajemen keamanan informasi (ISO 27001) merupakan standar yang harus dimengerti, dipahami dan diterapkan oleh setiap organisasi/perusahaan/instansi yang akan menerapkannya sebagai bentuk pengamanan terhadap informasi dan sistem informasi yang berjalan di organisasi/perusahaan/instansi tersebut. Penerapan standar sistem manajemen keamanan informasi biasanya memerlukan biaya dalam penyediaan software, hardware maupun pelatihan sumberdaya yang ada.

Perubahan budaya kerja dapat menjadi kendala bagi organisasi/perusahaan/instansi yang tidak memiliki standar dalam pengelolaan kerja, akan tetapi tidak menjadi kendala bagi organisasi/perusahaan/instansi yang telah mengimplementasi standar sistem manajemen mutu (ISO 9000) dan atau sistem standar lainnya baik yang bersifat lokal ataupun internasional. Hal ini disebabkan penerapan standar bagi organisasi/perusahaan/ instansi akan membantu terciptanya budaya kerja positif dalam pengelolaan kerja.

Berdasarkan visi dan misi Kota Cerdas (*Smart City*) Banjarbaru serta sasaran *quick win* dari Kota Cerdas (*Smart City*) Banjarbaru, maka aplikasi dan perangkat lunak pendukung Kota Cerdas (*Smart City*) diutamakan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan pembangunan. Aplikasi dan perangkat lunak yang diutamakan adalah pada sektor integrasi pelayanan pada kependudukan, perijinan, kesehatan dan pariwisata dengan menggunakan login satu akun atau berbasis NIK (Nomer Induk Kependudukan). Aplikasi dan perangkat lunak tersebut yaitu :

1. Berorientasi pada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi (*E-Government*) yaitu diutamakan pada pelayanan kesehatan, pelayanan dokumen kependudukan dan layanan perijinan.
 - a. Pelayanan dokumen kependudukan
Kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti dokumen kartu keluarga, KTP, pindah dan mutasi secara online.
 - b. Pelayanan rumah sakit
Kemudahan masyarakat dalam pengurusan layanan rumah sakit dan kesehatan, kemudahan manajemen rumah sakit dan layanan lebih bagus dan ada kepastian seperti layanan rawat inap, layanan pendaftaran poli secara online.
 - c. Pelayanan perijinan
Kemudahan masyarakat dalam pengurusan perijinan serta kemudahan dalam pengelolaan pendapatan daerah, seperti pendaftaran usaha UMKM, pendaftaran ijin baleho secara online.
2. Pengembangan Destinasi Wisata FUNTASTIX yaitu meningkatkan tingkat destinasi wisata alam, pengalaman, bahari, budaya, pendidikan, ketenangan, *spirituality*, *sustainability* di Banjarbaru, dengan dukungan aplikasi atau perangkat lunak. Pelayanan Pariwisata yaitu Memudahkan memberikan informasi kepada masyarakat serta memandukan varian wisata di Kota Banjarbaru.

Semua aplikasi atau perangkat lunak yang dibangun diatas akan terhubung dengan *backbone* Pemerintah Kota Banjarbaru dan datanya akan masuk ke data *warehouse* dan API Kota Cerdas (*Smart City*) Banjarbaru,

selanjutnya...

selanjutnya informasi penting dapat diakses dan ditayangkan secara realtime melalui *Command Center* Banjarbaru. Selain itu akan diimplementasi dengan keamanan informasi berdasarkan standar terhadap seluruh informasi yang berjalan di Kota Cerdas (*Smart City*) Banjarbaru.

D. Rencana Penguatan Literasi Kota Cerdas (*Smart City*) Daerah

Literasi digital merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan konten dari piranti digital secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks seperti akademik, karir dan kehidupan sehari-hari.

Dalam kaitannya dengan Kota Cerdas (*Smart City*) Banjarbaru, literasi Kota Cerdas (*Smart City*) dapat dikatakan merupakan pengetahuan dan pemahaman akan konsep Kota Cerdas (*Smart City*) yang perlu disampaikan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan konsep Kota Cerdas (*Smart City*) Banjarbaru secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru bekerja sama dengan akademisi, dunia usaha dan para Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) Kota Banjarbaru akan mengadakan kegiatan penguatan literasi dalam bentuk sosialisasi untuk memperkenalkan konsep Kota Cerdas (*Smart City*), sehingga setiap warga Kota Banjarbaru dapat belajar, berpartisipasi dalam pembangunan kota dengan konsep *Smart City*.

Literasi Kota Cerdas (*Smart City*) dilakukan melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran (awareness) warga melalui ragam media, seperti informasi melalui media massa seperti koran, televisi dan radio, sosialisasi melalui media sosial (facebook, twitter dan instagram) pemerintah kota dan komunitas online, serta melalui Camat, Lurah dan Ketua Rukun Tetangga serta pemasangan spanduk dan baliho di tempat-tempat yang strategis. Selain itu, Pemerintah kota Banjarbaru juga dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang ada di kota Banjarbaru untuk melaksanakan Sosialisasi.

Selanjutnya sosialisasi Kota Cerdas (*Smart City*) juga, akan berhasil jika dimasukkan sebagai kegunaan dalam bentuk pelayanan untuk masyarakat. Pelayanan secara baik dan cepat melalui konsep Kota Cerdas (*Smart City*) akan membawa Kota Cerdas (*Smart City*) masuk ke tengah masyarakat dan akan diterima oleh masyarakat secara wajar dan pada akhirnya bisa bermanfaat secara ekonomi kepada masyarakat.

BAB V

PETA JALAN PEMBANGUNAN KOTA CERDAS (*SMART CITY*) BANJARBARU

A. Quick Win...

A. Quick Win Kota Cerdas (*Smart City*)

Berdasarkan hasil bimbingan teknis yang dilaksanakan di Kota Banjarbaru, *Quick Win Kota Cerdas (Smart City)* Banjarbaru ditetapkan ada dua yaitu :

1. Program Lapat Enak (Lahir Langsung Dapat Akta Anak)

Lapat Enak adalah kepanjangan dari Lahir Langsung Dapat Akta Anak yang merupakan program dari RSD Idaman Kota Banjarbaru bekerjasama dengan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk memudahkan orang tua bayi yang lahir di RSD Idaman Kota Banjarbaru dalam pengurusan Akta Kelahiran. Tahapannya adalah sebagai berikut :

- a. Ketika bayi telah lahir di RSD Idaman, orang tua bayi atau keluarga pasien dapat langsung mengurus akta kelahiran bayi apabila sudah memiliki nama. Syarat-syarat untuk pembuatan akta kelahiran adalah sebagai berikut :
 - Fotokopi Buku Nikah 1 (satu) lembar
 - Fotokopi e-KTP suami isteri 1 (satu) lembar
 - Asli KK dan Fotokopi KK 1 (satu) lembar
 - Asli Surat Kelahiran dan Nama Bayi yang dikeluarkan RSD Idaman
 - Fotokopi Akta kelahiran anak terdahulu, apabila ada saudara kandung bayi masing-masing 1 (satu) lembar
 - Map kertas baru 2 (dua) buah (tanpa tulisan)
 - Tidak ada perbedaan nama pada KK, KTP dan Buku Nikah.
- b. Berkas diantar ke resepsionis manajemen di lantai 4 RSD Idaman Kota Banjarbaru. Petugas RS mengecek terlebih dahulu syarat-syarat yang dibawa pasien, apabila terdapat perbedaan nama di KTP atau KK, maka pasien diharuskan mengurus perbaikan ke kantor kecamatan atau ke KUA untuk perbaikan buku nikah. Setiap anggota keluarga diwajibkan mempunyai e-KTP.
- c. Apabila semua syarat sudah lengkap petugas RS akan memasukkan berkas atau menginput ke dalam aplikasi yang terhubung ke Disdukcapil Kota Banjarbaru. Selanjutnya petugas Capil segera melakukan pencetakan akta kelahiran.
- d. Akta kelahiran yang telah selesai akan diambilkan petugas RS setelah diketahui di aplikasi bahwa akta sdh selesai dicetak.
- e. Selanjutnya petugas RS akan mengambilkan akta di kantor disdukcapil dan mengantarkan kepada pihak keluarga/orang tua bayi.

Gambar 5. 1
Program LAPAT ENAK (Lahir Langsung Dapat Akta Anak)



2. Pengembangan Destinasi Wisata Funtastix (*Fun, Taste, Extra Ordinary Dan Experience*). Destinasi Wisata Kampung Purun Kota Banjarbaru

Anda yang ingin berwisata ke Kota Banjarbaru, kunjungi Kampung Purun Kota Banjarbaru, dapatkan pengalaman berharga Anda dengan belajar membuat kerajinan Purun di kelurahan Palam Kota Banjarbaru.

- *Pertama*** Anda menuju kampung purun posko wisata di jalan Palam Kel.Palam Banjarbaru. Bisa menghubungi petugas posko yang ditugaskan/ditetapkan oleh Disporabudpar Kota Banjarbaru Atau dapat *download* aplikasi Banjarbaru City Guide, di <https://play.google.com/store/apps/details?id=app.banjarbaru.cityguide>. Disitu akan dipandu bagaimana paket wisata funtastix salah satunya Kampung Purun. Petugas atau aplikasi menawarkan kepada wisatawan paket apa yg dipilih. Ada dua paket yang ditawarkan dalam wisata Kampung Purun yaitu Paket pake jukung atau paket tanpa jukung, sesuai dengan daftar harga yang sudah ditentukan.
- *Kedua*** *Guide* atau pemandu wisata akan mengarahkan atau menemani anda ke tempat tumbuhnya purun atau rawa, untuk mencari bahan kerajinan Purun. Menuju tempat yang mengasyikkan ini Anda akan menaiki jukung atau sampan. Atau bisa juga tanpa pakai jukung, mengambil purun di sekitar rumah pengrajin.
- *Ketiga*** dilanjutkan melakukan proses pengambilan tanaman Purun yang tumbuh hanya di daerah berair atau rawa. setelah proses pengeringan akan dilanjutkan proses penumbukkan atau pemipihan bahan purun dilakukan secara tradisional.

d. ***Keempat*** Jika...

- d. *Keempat* Jika proses pemipihan ini telah selesai, Anda akan Kami ajak melakukan proses pewarnaan, proses ini menggunakan pewarna buatan sehingga membuat bahan purun tersebut lebih menarik dan berwarna tentunya, Anda pun akan diajarkan bagaimana cara untuk memodifikasi pewarnaan pada Purun.
- e. *Kelima* selanjutnya proses penganyaman Purun yang sederhana, berupa lembaran kecil atau sesuai keinginan anda.
- f. *Keenam* purun yang anda buat akan dimasukkan ke souvenir sebagai tanda bahwa anda pernah ke kampung purun.

Purun bisa dibentuk menjadi bahan kerajinan bakul (tas tradisional Banjar), tas, dompet, topi, dan lain-lainnya, di Kampung Purun banyak yang akan Anda dapatkan, tentunya pengalaman berharga dalam proses pembuatan kerajinan Purun. Yuks, bikin Purun sesuai keinginanmu dan Ayo ke Banjarbaru.

Gambar 5. 2
Wisata FUNTASTIK Kampung Purun



B. Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah

Tahapan pembangunan Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Banjarbaru dibedakan menjadi tiga periode waktu, yaitu jangka pendek dengan periode 1 tahun dimulai tahun 2018, jangka menengah dengan periode 5 tahun dimulai rentang tahun 2018 – 2023 namun secara pembiayaan sampai Tahun 2021 sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka menengah yang telah lebih dahulu disusun sebelum perencanaan Kota Cerdas (*Smart City*) dan jangka panjang dengan periode 10 tahun, seperti yang tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 5 1
Peta Jalan (Roadmap) Pembangunan Smart Governance

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi SC	Nama Kegiatan di RKA yg mendukung inovasi SC	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Time LINE
Jangka Pendek											
1	Program Penataan administrasi kependudukan	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Melaksanakan kerjasama dan inovasi layanan kependudukan dan catatan sipil	Persentase inovasi dan kerjasama layanan yang ditindaklanjuti	Optimalisasi layanan administrasi kependudukan (Lapat enak, Larisay, E-Form, 234 sekali gawi, lauk sepat, pelanduk posyandu, Bintang Empat, Dorong Beca, Pelanduk 6 in 1, pelanduk 5 in 1, jebol siskamling, Ketapel Ku DatanglahLapat OSD, KIA Goes To School, Kampung tertib administrasi, Peri Tugu)	Kerjasama dan inovasi kependudukan	84	APBD	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	PKS pemanfaatan NIK data Kependudukan dan KTP-el dengan 4 skpd (Bappeda, DPM&PTSP, Dinsos, cRSDI Banjarbaru)	2018-2019

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat...

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi SC	Nama Kegiatan di RKA yg mendukung inovasi SC	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Time LINE
Jangka Pendek											
				Persentase inovasi dan kerjasama layanan yang ditindaklanjuti	Pembangunan aplikasi administrasi Kependudukan (pindah datang penduduk) dan aplikasi pendaftaran online	Pengembangan dan pemeliharaan SIAK dan teknologi informasi	175				2019
2	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Optimalisasi layanan perijinan online dan terpadu (Intan BJB), Mall Pelayanan Publik, dan Gerai Pelayanan Publik	Pengukuran IKM, Pengolahan Data Perijinan dan Peningkatan Standarisasi Pelayanan	422	APBD	DPMPTSP	Disdukcapil, Samsat, BPJS, BPPRD, Polres, Bank Kalsel	2019
3	Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Peningkatan TIK		Meningkatnya konektivitas penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	Persentase radio dan fiber optik terpasang dan telah digunakan unit kerja	Pembangunan jaringan FO dan Pengelolaan data center, NOC	Penyelenggaraan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery dan TIK	5.457		Dinas Komunikasi dan Informatika	SKPD Pemko	2019

Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan...

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi SC	Nama Kegiatan di RKA yg mendukung inovasi SC	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Time LINE
Jangka Pendek											
4	Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK	Peningkatan Efisiensi Kebijakan Publik	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	Persentase indikator SPBE	Layanan eGovernment yang terintegrasi, disertai dengan pengembangan Government Service Bus untuk interoperabilitas serta satu portal layanan informasi publik	Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang Terintegrasi	200	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika	SKPD Pemko	2019
5	Program Layanan Penjaminan Kedaulatan Informasi Pemerintah Daerah			Persentase indikator SPBE	Implementasi aplikasi administrasi perkantoran (<i>e-Office</i>)	Perumusan Regulasi, kebijakan dan monev di bidang nama domain, sub domain, serta website dan konten	10		Dinas Komunikasi dan Informatika	SKPD Pemko	2019

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi SC	Nama Kegiatan di RKA yg mendukung inovasi SC	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Time LINE
Jangka Menengah											
1	Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pemanfaatan TIK	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	Persentase indikator SPBE	Intergrasi internal pemerintah (INTIP)	Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang Terintegrasi	25.681	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika, seluruh SKPD-SKPD Kota Banjarbaru	DPRD, Provider, Komunitas TIK, Akademisi	2019-2021
2	Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Peningkatan TIK		Meningkatnya konektivitas penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	Persentase radio dan fiber optik terpasang dan telah digunakan unit kerja	Fasilitasi koneksi instansi kota Idaman Banjarbaru (SIMAN)	Penyelenggaraan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery dan TIK Penyelenggaraan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Daerah	9.057	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika	DPRD, Provider, Komunitas TIK, Akademisi	2019-2021
3	Program Layanan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pemerintah Daerah melalui Pemanfaatan TIK		Persentase SDM TIK yang kompeten	Peningkatan kemampuan kompetensi TIK ASN dan Masyarakat	Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik berbasis Elektronik	920	Dinas Komunikasi dan Informatika		DPRD, Provider, Komunitas TIK, Akademisi		

Program Penataan administrasi kependudukan...

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi SC	Nama Kegiatan di RKA yg mendukung inovasi SC	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Time LINE
Jangka Menengah											
4	Program Penataan administrasi kependudukan	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Menjadikan identitas kependudukan (NIK) sebagai basis data dalam pelayanan publik	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	Optimalisasi layanan administrasi kependudukan	Kerjasama dan inovasi kependudukan	8.889	APBD	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	DPRD, Dinas Komunikasi dan Informatika, Provider, Komunitas TIK, BPS, Akademisi, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, RS Idaman, Kementerian Dalam Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Dinas Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan.	2019-2021
		Meningkatnya validitas database kependudukan	Presentase database kependudukan yang valid dan update	Validasi pendataan data base kependudukan							
		Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	Cakupan Penyelesaian penerbitan dokumen catatan sipil yang dapat diselesaikan tepat waktu	Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil							
		Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk	Cakupan Penyelesaian penerbitan dokumen kependudukan yang dapat diselesaikan tepat waktu	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan							
				Penatausahaan Data Kependudukan							
				Peningkatan pelayanan publik Dalam Bidang Kependudukan							

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi SC	Nama Kegiatan di RKA yg mendukung inovasi SC	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Time LINE
Jangka Menengah											
				Persentase permohonan yang sudah selesai ditindaklanjuti untuk perbaikan dokumen kependudukan							
5	Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kinerja Birokrasi Pemerintah	Meningkatnya kualitas layanan informasi publik	Persentase PPID utama dan pembantu aktif Persentase KIM yang dibina	Layanan PPID Pembentukan KIM ditiap kelurahan	Pelayanan Permintaan Informasi Publik Fasilitasi dan Konsultasi Sumber Daya Komunikasi Publik	900	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika	DPRD, Provider, Komunitas TIK, Akademisi	2019-2021
6	Program Layanan Penjaminan Keadaulatan Informasi Pemerintah Daerah		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	Persentase unit kerja yang telah menggunakan website dengan domain banjarbarukot a.go.id	Sistem informasi aplikasi dan WEB (SIAPWEB)	Penyelenggaraan Nama Domain dan Sub Domain Bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah	2.590		Dinas Komunikasi dan Informatika	DPRD, Provider, Komunitas TIK, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bappeda, Dinas Penanaman Modal dan	

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi SC	Nama Kegiatan di RKA yg mendukung inovasi SC	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Time LINE
Jangka Menengah											
				Persentase pengadaan barang dan jasa yang telah menggunakan LPSE	LPSE yang memenuhi standar	Penyelenggaraan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten/ Kota				Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Akademisi.	
7	Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kinerja Birokrasi Pemerintah		Persentase pengaduan masyarakat yang telah di tindak lanjuti menggunakan aplikasi LAPOR!	Implementasi Aplikasi aduan LAPOR!	Pemantau Isu Publik, Pendapat umum dan Aduan Masyarakat	350	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika	SKPD Pemko	2019-2021
8	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur		Peningkatan Pengelolaan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan jabatan fungsional tertentu	Persentase pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas yang memenuhi syarat jabatan	Aplikasi SIJAPTI (Sistem Informasi Jabatan pimpinan tinggi dan SAPA (sistem Administrasi Penempatan aparatur)	Seleksi Jabatan ASN	3.500		BKPP		
			Persentase jabatan fungsional tertentu yang memenuhi syarat jabatan		Pengembangan Jabatan Fungsional	250					

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi SC	Nama Kegiatan di RKA yg mendukung inovasi SC	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Time LINE
Jangka Menengah											
9	Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatkan Kinerja Birokrasi Pemerintah	Meningkatnya rekomentasi hasil evaluasi kinerja yang selesai ditindak lanjuti SKPD sesuai ketentuan	Presentase Rekomendasi Hasil evaluasi kinerja yang selesai ditindaklanjuti SKPD sesuai ketentuan	Klinik Konsultasi Berintegrasi	Evaluasi LAKIP SKPD	262	APBD	Inspektorat	SKPD Pemko	2018-2019

Tabel 5 2
Peta Jalan (Roadmap) Pembangunan Smart Branding

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran (Jt)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
Jangka Pendek											
1	Perencanaan Sosial Budaya	Memban- gun dan memasar- kan ekosis- tem pariwi- sata (tourism branding)	Meningkatnya keselarasan RPJMD dengan Renstra Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, SATPOL PP, RSD IDAMAN, BAKESBANGP OL, Dinas Sosial, BPBD, Disdukcapil, DISDALDUKK B, PMPPPA, DISPORABUD PAR, Dinas Arsip Perpusda, SETDAKO, SETDPRD, Inspektorat	Persentase Keselarasan Sasaran RPJMD dengan sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, SATPOL PP, RSD IDAMAN, BAKESBANGP OL, Dinas Sosial, BPBD, Disdukcapil, DISDALDUKKB , PMPPPA, DISPORABUDP AR, Dinas Arsip Perpusda, SETDAKO, SETDPRD, Inspektorat	Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Kota Banjarbaru (RIPARDA)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sosial Budaya	isikan dengan anggaran sesuai jumlah di RKA untuk menyusun RIPARDA	APBD	Bappeda	Disporabu dpar, DPRD, ASITA, PHRI, SKPD Terkait	2018

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran (Jt)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline	
Jangka Pendek												
		Membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (tourism branding)	Meningkatnya keselarasan RPJMD dengan Renstra Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, SATPOL PP, RSD IDAMAN, BAKESBANGP OL, Dinas Sosial, BPBD, Disdukcapil, DISDALDUKKB, PMPPPA, DISPORABUDPAR, Dinas Arsip Perpusda, SETDAKO, SETDPRD, Inspektorat	Meningkatnya keselarasan RPJMD dengan Renstra Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, SATPOL PP, RSD IDAMAN, BAKESBANGP OL, Dinas Sosial, BPBD, Disdukcapil, DISDALDUKKB, PMPPPA, DISPORABUDPAR, Dinas Arsip Perpusda, SETDAKO, SETDPRD, Inspektorat	Penyusunan RIPOW (Rencana Induk Perencanaan Onyek Wisata) Pumpung	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sosial Budaya		APBD	Bappeda	Disporabudpar, DPRD, ASITA, PHRI, SKPD Terkait	2019	
2	Program Kerja Sama Pembangunan			Perusahaan dan atau pendonor yang berkontribusi terhadap pembangunan Kota	Bantuan uang tunai, fasilitas mengikuti pameran umkm, dan pembuatan gapura	Penyelenggaraan Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Dunia Usaha	308	Dana CSR Swasta	Swasta	Kelurahan		2018
3	Pengembangan Kemitraan		Mengembangkan Kemitraan dan kelembagaan kepariwisataan	Persentase lembaga dan mitra kepariwisataan terbentuk dan terbina	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Pengembangan Kemitraan	574	APBD	Disporabudpar	Pokdarwis se Kota Banjarbaru		2018-2019

Layanan Penyelenggaraan...

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran (Jt)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
Jangka Pendek											
4	Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah		Peningkatan pemanfaatan saluran media komunikasi publik	Persentase informasi pembangunan yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik	Publikasi kegiatan pemerintah dan masyarakat melalui internet streaming (Banjarbaru TV)	Pengelola dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik	150	APBD	Diskominfo	Bag. Humas dan Protokol, Semua SKPD, dll	2018-2019
5	Pengembangan Destinasi Wisata	Membangun dan memasarkan wajah kota (city appearance branding)	Mengembangkan Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi Wisata yang dikembangkan	Pengembangan kampung Tematik	Pengembangan Destinasi Wisata	2.721	APBD	Disporabudpar	Kec dan Kel se Kota Bjb, SKPD terkait	2018-2019
6	Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase promosi wisata dalam dan luar negeri	Promosi Kepariwisata "Ayo ke Banjarbaru"	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	545	APBD	Disporabudpar	Disporabudpar, ASITA, PHRI, SKPD Terkait	2018-2019
7	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	City Business Branding	Meningkatnya UMKM yang mendapat akses perluasan pasar	Persentase UMKM yang mendapat akses pasar	Implementasi aplikasi UMKM Go Online/Sistem Promosi Produk UMKM	Perluasan akses pasar bagi produk UMKM	347	APBD	Dinas Nakerkop dan UKM	Pengusaha UKM, BUMD/BU MN, Dinas Perdagangan	2018-2019

Pengembangan Kemitraan...

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran (Jt)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
Jangka Menengah											
1	Pengembangan Kemitraan	Membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (tourism branding)	Mengembangkan Kemitraan dan kelembagaan kepariwisataan	Persentase lembaga dan mitra kepariwisataan terbentuk dan terbina	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	kemitraan pariwisata Kelembagaan Kepariwisata-an	1.586	APBD	Disporabud-par	Pokdarwis se Kota Banjarbaru	2020-2021
2	Program Kerja Sama Pembangunan			Perusahaan dan atau pendonor yang berkontribusi terhadap pembangunan Kota	Bantuan uang tunai untuk promosi pariwisata	Penyelenggaraan Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Dunia Usaha	25	Dana CSR Swasta	Swasta	Disbudpar-pora	2019
3	Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah		Peningkatan pemanfaatan saluran media komunikasi publik	Persentase informasi pembangunan yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik	Publikasi kegiatan pemerintah dan masyarakat melalui internet streaming (Banjarbaru TV)	Pengelola dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik	400	APBD	Diskominfo	Bag.Humas dan Protokol, Semua SKPD, dll	2020-2021
4	Program Pengelolaan keragaman Budaya		Meningkatnya jumlah keragaman seni dan budaya yang dilestarikan	Jumlah Penyelenggaraan Festival seni dan budaya Jumlah organisasi/ grup kesenian yang aktif	Sistem Promosi Pariwisata dan Budaya Daerah	Perkembangan Keragaman Budaya Daerah Penyelenggaraan Festival Budaya daerah	5.481	APBD	Disporabud-par	Bappeda,DISKOMINFO, Humas, PHRI, ASITA, Pokdarwis, Dewan Kesenian, Dinas UKM dan Naker, Dinas LH, PNGB(duta wisata)	2020-2021

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran (Jt)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
	Jangka Menengah										
				Jumlah bangunan cagar budaya dalam kondisi baik dan terlindungi	Sistem Manajemen Asset Sejarah dan Budaya Daerah	Peninggalan Sejarah yang dilestarikan					
5	Pengembangan Destinasi Wisata	Membangun dan memasarkan wajah kota (city appearance branding)	Mengembangkan Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi Wisata yang dikembangkan	Pengembangan kampung Tematik	Penataan Kawasan dan Amenitas Pariwisata	7.709	APBD	Disporabud-par	Bappeda, DISPER-KIM, DISPUPR, DISKOMINFO, Humas, DISDAG, DISHUB, PHRI, ASITA, Pokdarwis, FKPD, persatuan salon, Dinas UKM dan Naker, Dinas LH, PNGB(duta wisata), IMIGRASI. Angkasa Pura.	2020-2021

Pengembangan Pemasaran Pariwisata...

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran (Jt)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
Jangka Menengah											
6	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Membangun dan memasarkan wajah kota (city appearance branding)	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase promosi wisata dalam dan luar negeri	Sistem Manajemen Potensi Wisata, (road show promo, kalender event)	Pelaksanaan promosi pariwisata	1.544	APBD	Disporabud-par	Bappeda, DISPERKIM, DISPU PR, DISKOMINFO, Humas, DISDAG, DISHUB, PHRI, ASITA, Pokdarwis, FKPD, persatuan salon, Dinas UKM dan Naker, Dinas LH, PNGB(duta wisata), IMIGRASI. Angkasa Pura.	2020-2021
7	Program Pembangunan/Pemeliharaan Taman		Meningkatnya kualitas taman di kota Banjarbaru	Persentase taman dalam kondisi baik	Sistem Monitoring Pemeliharaan Taman dan RTH	Peningkatan Penataan Taman Kota	17.610	APBD	Disperkim	Dinas PU&PR	2020-2021
8	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Meningkatnya jumlah RTH publik	Persentase jumlah lokasi RTH publik yang dibangun	Sistem Informasi RTH Kota Banjarbaru	Perencanaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	27.424	APBD	Dinas PU dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan dan Permukiman	2019-2021
9	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Meningkatnya realisasi investasi daerah	Jumlah kerjasama investasi (PMA&PMDN)	Sistem Identifikasi Potensi dan Promosi Investasi daerah	Penyelenggaraan Pameran Investasi	569	APBD	pmptsp	Investor	2019-2021

Tabel 5 3...

Tabel 5 3
Peta Jalan (Roadmap) Pembangunan Smart Economy

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
Jangka Pendek											
1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Memban- gun ekosistem industri yang berdaya saing (industry)	Meningkatnya UMKM yang mendapat akses perluasan pasar	Persentase UMKM yang mendapat perluasan akses pasar	Pengemba- ngan Ekonomi Kreatif	Perluasan akses pasar bagi produk UMKM	347	APBD	Dinas Nakerkop dan UKM	Pengusaha UMK, BUMD/BU MN, Dinas Perdaga- ngan	2018- 2019
2	Program Kerja Sama Pembangu- nan			Perusahaan dan atau pendonor yang berkontribusi terhadap pembangunan Kota	Bantuan Modal usaha, pelatihan UMKM, dan pertanian	Penyelenggar aan Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Dunia Usaha	350	Dana CSR Swasta	Swasta	Kelurahan, Diskopukm naker	2018
3	Program Peningkatan dan Pengelolaan Pasar	Memban- gun Ekosis- tem Tran- saksi Keu- angan (<i>Transac- tion</i>)	Meningkatkan Klasifikasi pasar rakyat yang dikelola secara modern	Persentase sarana prasarana pasar yang tersedia	Revitalisasi dan pembanguna n pasar rakyat	Peningkatan dan Pengelolaan Pasar	1.700	APBD dan APBN-DAK	DISDAG	Kemen- trian perda- ngan	2018- 2019

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
Jangka Pendek											
4	Program Intensifikasi dan Ekstensi sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah	Memban- gun Ekosis- tem Tran- saksi Keu- angan (<i>Transac- tion</i>)	Meningkatnya Wajib Pajak yang telah membayar Pajak	Persentase Wajib Pajak yang telah membayar pajak	Pelayanan pajak melalui fasilitas ANTARI (Anda telepon kami hampiri)	Intensifikasi dan Eksten- sifikasi sumber- sumber Pendapatan Daerah	619	APBD	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah	Bank Kasel, Kecamatan dan Kelurahan	2018
Jangka Menengah											
1	Program Peningkatan Promosi Produk Industri	Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (industry)	Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan IKM	Persentase produk IKM yang dipromosikan	Pengembangan E-Smart/ Digital	Pengembangan usaha melalui ekonomi kreatif	863	APBD dan APBN	DISDAG	Dinas Nakerkop dan UKM, Bekraf, Pelaku Usaha	2019-2021
2	Program Kerja Sama Pembangunan			Perusahaan dan atau pendonor yang berkontribusi terhadap pembangunan Kota	Bantuan bibit untuk kelompok tani	Penyelenggaraan Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Dunia Usaha	181	Dana CSR Swasta	Swasta	DKP3	2019
3	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah memperkuat jaringan klaster			Persentase pertumbuhan Jumlah IKM	Sistem Pendampingan dan Pembinaan IKM , E-Sales Chart IKM (Grafik Penjualan)	Pembinaan Industri kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster	822	APBD	DISDAG	Pelaku usaha	2019-2021

Program Pengembangan Kewirausahaan...

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
Jangka Menengah											
4	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (industry)	Meningkatnya Jumlah UMKM baru	Jumlah UMKM baru	Sistem Informasi pelatihan kewirausahaan	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	300	APBD	Diskop UMKM &Naker	Kecamatan, Kelurahan	2019-2021
5	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Meningkatnya koperasi yang aktif	Persentase Koperasi yang aktif	Sistem Pendataan dan Pembinaan Koperasi/Pengembangan aplikasi Siaminantar BHK	Pelatihan manajemen Pengelolaan Koperassi	2.192	APBD	Diskop UMKM &Naker	Kecamatan, Kelurahan	2019-2021
6	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi		Meningkatnya realisasi investasi daerah	Jumlah Izin penanaman modal yg diterbitkan	Sistem Pelaporan Realisasi PMDN/PMA	Peningkatan kegiatan Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	231	APBD	Dpmpptsp	Investor/Perusahaan penanaman Modal	2019-2021
		Sistem Informasi Direktori Perusahaan PMDN/PMA			Sistem Monitoring Penanaman Modal daerah	172	APBD	Dpmpptsp	Investor/Perusahaan penanaman Modal	2019-2021	

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
Jangka Menengah											
7	Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatkan Kesejahteraan rakyat	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Sistem Informasi Monitoring Produktivitas hasil perikanan (SIMONTOK RIKA)	Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar	1.009	APBD	DKP3	Diskopumk m&naker, Dinas PU & Penataan Ruang, Kecamatan, Kelurahan	2019-2021
8	Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan		Meningkatkan Produksi pangan	Total Produksi pangan	Sistem Pengawasan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok (SIPENTIL HAPOK)	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	8.049	APBD	DKP3	Disdag, Dinas PU & Penataan Ruang, Kecamatan, Kelurahan	2019-2021
9	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		Terjaganya produk pangan segar peternakan	Persentase Produk Pangan segar peternakan yang tercemar	Sistem Informasi Monitoring Sarana/prasarana Produksi Ternak (SIRASA PRONA)	Pembinaan Kesehatan masyarakat veteriner	4.282	APBD	DKP3	Kecamatan, Kelurahan	2019-2021
10	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)		Meningkatnya Akses Informasi Teknologi Pertanian	Persentase sarana media elektronik dan media cetak yang dapat dijangkau oleh penyuluh pertanian dan masyarakat petani	Sistem Informasi Ketahanan Pangan Daerah (DKP3)	Pengembangan Informasi Pertanian	554	APBD	DKP3	Diskominfo, Kecamatan, Kelurahan	2019-2021

Peningkatan Kesejahteraan Petani...

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
Jangka Menengah											
		Meningkatkan Kesejahteraan rakyat	Terpenuhi nya ketersediaan pangan	Ketersediaan Sembilan (9) kelompok bahan pangan	GITASASMITA sebuah teknologi pertanian berbasis masyarakat perkotaan dalam mencapai ketahanan pangan masyarakat dng aplikasi SIKEPANG (sistem informasi ketahanan pangan)Sistem Informasi Pemantauan Produksi Pertanian/perkebunan	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	1.894	APBD	DKP3	Kecamatan, Kelurahan	2019-2021
11	Peningkatan Kesejahteraan Petani		Meningkatnya Kelas Kelompok Tani	Persentase Kelas Kelompok Tani	Sistem Monitoring Sumber pangan alternatif	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	1.704	APBD	DKP3	Kecamatan, Kelurahan	2019-2021
12	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan		Meningkatkan Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima	Persentase Pemberdayaan dan Penataan PKL	Sistem Informasi database PKL	Pembinaan penataan dan Penertiban Pasar dan PKL	1.589	APBD	DISDAG	Tim lintas Sektoral paguyupan /furom PKL	2019-2021
13	Program Peningkatan dan Pengelolaan Pasar	Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan (Transaction)	Meningkatkan klasifikasi pasar rakyat yang di kelola secara modern	Persentase sarana dan prasarana pasar	Pembangunan Pasar Tradisional Modern "bauntung" dan AYO BAPARAK (Ayo berbelanja ke pasar rakyat	Peningkatan dan Pengelolaan Pasar	607	APBD	disdag	Bank Kalsel	2019-2021

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timelin e
Jangka Menengah											
			Meningkatkan kepatuhan para pedagang terhadap kewajiban pembayaran retribusi	Persentase peningkatan pelayanan PAD Pasar	Pengelolaan Pasar Tradisional, Aplikasi retribusi pasar	Peningkatan dan Pengawasan PAD pasar	342	APBD	disdag	Bank Kalsel	2020
14	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah	Memba- ngun Ekosistem Transaksi Keuangan (<i>Transaction</i>)	Meningkatkan sumber-sumber PAD untuk kesejahteraan masyarakat	Persentase penerimaan pajak dan retribusi daerah	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen daerah pendapatan on-line (SIMDA) E-PBB E-BPHTB, Tapping Box	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah Pendataan & penetapan BPHTB insifikasi penagihan pajak	3.635	APBD	BPPRD	BPN, Per- bankan, Notaris/ PPAT, PT. Gojek Indonesia, Kecamatan, Kelurahan, RT	2019- 2021

Tabel 5 4
Peta Jalan (Roadmap) Pembangunan Smart Living

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran (Jt)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
	Jangka Pendek										
1	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BLUD)	Mewujudkan Kualitas Kesehatan Masyarakat (Health)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Bidang Penunjang	Persentase IKM terhadap pelayanan	Pembangunan dan pemanfaatan aplikasi pendaftaran layanan rumah sakit Banjarbaru online (Pendaftaran online)	Penyusunan Informasi Rekam Medik	50	APBD	RS Idaman		2018
			Meningkatkan Kualitas dan efektifitas Manajemen RS	Beroperasinya Simfoni Masa (sistem Informasi manajemen terintegrasi RS)	Pembangunan dan pemanfaatan aplikasi SIM RS	Operasional Pendukung BLUD	695	APBD	RS Idaman		2019

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran (Jt)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
Jangka Pendek											
2	Program Kerja Sama Pembangunan	Mewujudkan Kualitas Kesehatan (Health)		Perusahaan dan atau pendonor yang berkontribusi terhadap pembangunan Kota	Bantuan kemanusiaan, posyandu, program air bersih, pembuatan jembatan, pembuatan trotoar, penge-rasan jalan, penerangan jalan, layanan kesehatan keliling, pembuatan sanitari drainase resapan, pembua-tan green house, gajebo, pojok literasi, pot bunga, sumur bor dan fasilitas umum lainnya	Penyelenggaraan Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Dunia Usaha	668	Dana CSR Swasta	Swasta	Disdik, PU & PR, Dinkes, Kecamatan, Kelurahan	2018

Program Kerja Sama Pembangunan...

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran (Jt)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
Jangka Pendek											
	Program Kerja Sama Pembangunan	Mewujudkan Kualitas Kesehatan (Health)		Perusahaan dan atau pendonor yang berkontribusi terhadap pembangunan Kota	Bantuan kemanusiaan, posyandu, program air bersih, pembuatan jembatan, pembuatan trotoar, pengerasan jalan, penerangan jalan, layanan kesehatan keliling, pembuatan sanitasi drainase resapan, pembuatan green house, gajebo, pojok literasi, pot bunga, sumur bor dan fasilitas umum lainnya	Penyelenggaraan Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Dunia Usaha	668	Dana CSR Swasta	Swasta	Disdik, PU & PR, Dinkes, Kecamatan, Kelurahan	2018
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		Terlaksananya Puskesmas dan jejaring kesehatan yang melaksanakan sistem informasi kesehatan	Persentase Puskesmas yang melaksanakan sistem informasi dan pelaporan	Layanan e-Puskesmas	Sistem Manajemen dan Informasi Kesehatan	173.414	APBD	Dinkes	BPKAD	2019

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran (Jt)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
Jangka Pendek											
4	-	Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (Harmony)	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Persentase masyarakat yang memanfaatkan fasilitas fitne outdoor	Penyediaan peralatan Fitnes out door di beberapa ruang terbuka hijau (RTH)	-	450	APBD	Dinkes	Dinas LH, Dinas PU&PR,	2018-2019
5	Program Perencanaan Tata Ruang		Terwujudnya tertib perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas dan informasi rencana tata ruang yang bisa diakses publik	Pemanfaatan aplikasi sistem manajemen tata ruang online (SIMANTAP)	Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Tata Ruang	663	APBD	Dinas PU dan Penataan Ruan	Bappeda, Diskominfo	2019
6	Peningkatan pelayanan angkutan	Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (Mobility)	Peningkatan Penggunaan angkutan pelajar gratis	Persentase pelajar yang menggunakan angkutan pelajar gratis	Penyediaan armada ukangkutan pelajar gratis	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	3.304	APBD	Dishub	Disdik	2018
Jangka Menengah											
1	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Mewujudkan Prasarana Kesehatan (Health)	Tercapainya TPM yang memenuhi syarat kesehatan	Cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan	TTU / TPM yang sehat	Peningkatan Penyehatan Lingkungan TTU dan TPM	2.384	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas PU & Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	2019-2021

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran (Jt)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
Jangka Menengah											
2	Program Kerja Sama Pembangunan	Mewujudkan Prasarana Kesehatan (Health)		Perusahaan dan atau pendonor yang berkontribusi terhadap pembangunan Kota	Bantuan Fisik non tunai RTH Taman Pintar	Penyelenggaraan Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Dunia Usaha	849	Dana CSR Swasta	Swasta	Dinas PU dan Penataan Ruang	2019
3	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya		Meningkatnya jumlah sarana prasarana puskesmas sesuai standar	Cakupan Sarana dan Prasarana Puskesmas yang sesuai standar	Sistem Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	76.669	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	2019-2021
4	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan		Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan (9 profesi kesehatan) yang sesuai dengan kompetensi	Jumlah Nakes dan Non Nakes yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Sistem Manajemen Pelatihan dan karir bagi tenaga bidang kesehatan	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan	1.202	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	Dinas PM dan PTSP, BAPELKES	2019-2021
5	Peningkatan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BLUD)		Peningkatan SDM RS Idaman yang sesuai kompetensi bidang	Persentase sumber daya aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Sistem Manajemen Pelatihan dan karir bagi tenaga bidang kesehatan	Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan	494	APBD, APBN	RS Idaman	BKPP	2019-2021

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran (Jt)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
Jangka Menengah											
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Mewujudkan Kualitas Kesehatan (Health)	Peningkatan penanggulangan penyakit menular	Persentasi Penemuan orang yang berisiko terinfeksi HIV yang ditangani	sistem monitoring penderita HIV dan penyakit spesifik lainnya Program deteksi dini dan tindak lanjut penderita HIV/AIDS (SI DINI TINJU)	Fasilitasi Penanggulangan AIDS	297	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	Bappeda, RS Idaman, Satpol PP, Dinsos, BPJS, Kecamatan, Kelurahan	2019-2021
				persentase penemuan terduga TBC yg ditangani sesuai standar	Melapor terduga TBC melalui WA (Mewah) Pemberian reward kepd petugas bila mencapai target SPM terduga TBC	Fasilitasi Penanggulangan TBC	110				2019-2021
7	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (Harmony)	Meningkatnya Konektivitas antar pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota	Persentase konektivitas antar pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota	Sistim Informasi Jalan dan Jembatan Kota Banjarbaru	Pembangunan Jalan	117.991	APBD	Dinas PU dan Penataan Ruang	Dinas Perhubungan	2019-2021
						Pembangunan jalan (DAK)	48.739	APBD			
						Pembangunan Jembatan	25.654	APBD			

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran (Jt)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
Jangka Menengah											
8	Program Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-gorong	Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (Harmony)	Meningkatnya sistem drainase dalam kondisi baik	Persentase saluran drainase kota yang berfungsi dengan baik	Sistem Informasi Drainase Kota banjarbaru	Normalisasi Drainase Jalan Kota	71.762	APBD, APBN	Dinas PU dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan dan Perumahan	2019-2021
						Pembangunan Drainase Jalan Kota	37.254				
						Pemeliharaan Rutin Drainase Jalan Kota	15.289				
						Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	66,69				
						Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase Lingkungan	25,53				
9	Program Perencanaan Tata Ruang		Mewujudkan tertib perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas dan informasi rencana tata ruang yang bisa diakses publik	Sistem informasi manajemen Tata ruang (simantap)	Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Tata Ruang	3.552	APBD	Dinas PU dan Penataan Ruang	Bappeda dan Diskominfo	2019-2021
10	Program penyediaan air minum		Terwujudnya infrastruktur air minum yang berkualitas dan merata	Persentase kepala keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman	Sistem Informasi Jaringan Air Minum	Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Minum (DAK)	67.028	APBD	Dinas PU dan Penataan Ruang	PDAM	2019-2021

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran (Jt)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
Jangka Menengah											
11	Program Pengembangan Perumahan	Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (Harmony)	Menurunnya rumah tidak layak huni	Persentase Rumah tidak layak huni tertangani	Sistem penataan dan monitoring kawasan pemukiman	'Pengendalian Penyelenggaraan Pengembangan Bangunan dan Perumahan	2.879	APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas PU dan Penataan Ruang	2019-2021
12	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh		Menurunnya persentase luasan kawasan permukiman kumuh	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Pembangunan jalan di lingkungan kumuh	Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman Kumuh	18.025	APBN APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas PU dan Penataan Ruang	2019-2021
			Menurunnya rumah tidak layak huni	Persentase Rumah tidak layak huni tertangani	Bedah rumah e-RTLH	Bantuan Rumah Swadya (DAK) Updating Inventarisasi RTLH	APBN (DAK) APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas PU dan Penataan Ruang	2019-2021	
13	Program Penataan & Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum		Meningkatnya kualitas PJU dalam kondisi baik	Persentase penerangan jalan umum yang terpasang di jalan umum dan lingkungan	Pemeliharaan dan pengantian Lampu-lampu jalan dengan LED, Aplikasi Sinyarak	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	42.871	APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas PU dan Penataan Ruang	2019-2021
14	Program Pengembangan dan Penelitian		Meningkatnya kajian dan pengembangan yg teraplikasi	Persentase kajian/penelitian dan pengembangan yang teraplikasi	Pengembangan Aerocity (BANG ROCY)		509	APBD	BAPPEDA		2019

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran (Jt)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
Jangka Menengah											
15	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (Mobility)	Meningkatnya kelancaran lalu lintas angkutan jalan	Kondisi fasilitas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik	Sistem Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rehabilitasi/pemeliharaan rambu jalan dan lampu peringatan	359,14	APBD	Dinas Perhubungan	Dinas PU dan Penataan Ruang, POLRES	2019-2021
						Rehabilitasi/pemeliharaan halte/shelter	1.362,9				2019-2021
						Pemeliharaan Median Jalan dan Trotoar	274,7				2019-2021
16	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (Mobility)	Peningkatan Penggunaan angkutan pelajar gratis	Persentase pelajar yang menggunakan angkutan pelajar gratis	Penambahan armada angkutan pelajar gratis	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	12.596	APBD	Dinas Perhubungan	Dinas PU dan Penataan Ruang, Disdik	2019-2021
17	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		Terlaksananya penanganan penyebab kemacetan lalu lintas	Cakupan penyebab kemacetan lalu lintas yang teratasi	Sistem Monitoring dan Pengamanan Lalu Lintas	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	2.446	APBD	Dinas Perhubungan	POLRES, BPTD, DISHUB Prov	2019-2021
						Pengadaan lampu peringatan jalan	2.002				2019-2021
						Pengawasan lalu lintas jalan dan pengawalan	1.095				2019-2021
			Pengadaan marka jalan	1.480	2019-2021						
18	Program Pengendalian dan keselamatan LLAJ		Tersedianya informasi Lalin	Cakupan penyebab kemacetan lalin yg teratasi	ATCS/ITS			APBN	BPTD Kalsel	Polres, dishub, Prop,BPTD, PU Bjb, PU Prop,Balai jalan Nasional	2020-2025

Tabel 5 5...

Tabel 5 5
Peta Jalan (Roadmap) Pembangunan Smart Society

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran (Jt)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
	Jangka Pendek										
1	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien (Community)	Meningkatnya kreatifitas siswa SD	Prosentase Siswa SD mengikuti lomba kreatifitas	Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter (5 karakter, religius, akhlak mulia, cinta tanah air, cinta lingkungan hidup, kewirausahaan)	Pengembangan Sekolah Berbasis Karakter Bina SD	332	APBD	Disdik	Lembaga Kualita Pendidikan Indonesia	2018
			Meningkatnya kreatifitas siswa SMP	Prosentase Siswa SMP mengikuti lomba kreatifitas		Pengembangan Sekolah Berbasis Karakter Bina SMP	536	APBD	Disdik	Lembaga Kualita Pendidikan Indonesia	2018
2	Program Kerja Sama Pembangunan			Perusahaan dan atau pendonor yang berkontribusi terhadap pembangunan Kota	Bantuan santunan, sarana prasarana sekolah, sarana prasarana ibadah, keamanan lingkungan, dan lain-lain	Penyelenggaraan Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Dunia Usaha	1.127	Dana CSR Swasta	Swasta	Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan	2018

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran (Jt)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
Jangka Pendek											
3	program pengendalian kependudukan		Peningkatan Kinerja kelompok/mitra kependudukan	Persentase kelompok/mitra kependudukan aktif	Kampung KB terintegrasi dengan RUMAH DATAKU dan HATInya PKK (Kampung KB Lestari)	pembinaan forum kerjasama pengendalian kependudukan	92,00	APBD	Disdalduk,KB,PMP &PA	Kelurahan	2018-2019
4	,-	Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien (Community)	pemenuhan papan penyandang disabilitas	Persentase penyandang disabilitas yg mendapatkan rumah	Rumah Pentas (rumah penyandang disabilitas)	,-	swasta	Sumbangan Pihak swasta	Swasta,BUMN, BUMD	Dinas LH, PU&PR,	2018-2019
5	Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Peningkatan TIK		Peningkatan jaringan intra Pemerintah Kota Banjarbaru	Terlaksananya pemasangan jaringan baru	Wifi Gratis untuk Publik dan Instansi Kota Idaman Banjarbaru	Penyelenggaraan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery dan TIK	52	APBD	Diskominfo	Telkom	2018
6	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat (Security)	Meningkatnya Pengamanan Kegiatan Insidentil	Cakupan Pelaksanaan Pengamanan Kegiatan Insidentil Yang Sesuai SOP	SATPOL PP Pariwisata	Patroli Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	805	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja	Dinas pemuda olahraga dan pariwisata	2018

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran (Jt)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
Jangka Pendek											
7	Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Peningkatan TIK		Peningkatan jaringan intra Pemerintah Kota Banjarbaru	Terlaksananya pemasangan jaringan baru	CCTV pada Fasilitas Publik	Penyelenggaraan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery dan TIK	200	APBD	Diskominfo	Polres, Dishub	2018-2019
8	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		Peningkatan pelayanan publik dla hal trantib	Persentase masyarakat yg memanfaatkan aplikasi	Pemanfaatan Aplikasi Siap Hadapi Beragam Kejahatan (SIHARAT)	,-		dana Polres	Polres Bbaru		2108
Jangka Menengah											
1	Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah	Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien (Community)	Peningkatan Kinerja kelompok Swadaya Masyarakat	Persentase Kelompok Swadaya aktif	LPM Berperstasi	Pembinaan LPM Kelurahan di Kota Banjarbaru	7.340	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2019-2021

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran (Jt)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
Jangka Menengah											
					Sistem Monitoring dan Pembinaan Keluarga Miskin	Pembinaan UPK Gerbangmas-taskin					
					Kelurahan Juara	Lomba Kelurahan					
2	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien (Community)	Meningkatnya kreatifitasa anak PAUD	Prosentase anak PAUD mengikuti lomba kreatifitas	Parenting Online	Pengembangan pendidikan anak usia dini	214	APBD	Disdik		2019
3	Program Kerja Sama Pembangunan	Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien (Community)		Perusahaan dan atau pendonor yang berkontribusi terhadap pembangunan Kota	Bantuan saung wifi corner, dana pembinaan, fasilitas keagamaan, program adiwiyata, kegiatan keagamaan, mobil ambulance, dan lain-lain	Penyelenggaraan Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Dunia Usaha	1.514	Dana CSR Swasta	Swasta	Dinsos, Disbudparpora, Disdik, RSDI, Kesra, DKP3, Kelurahan	2019
4	Program Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	Membangun Ekosistem Belajar Yang Efisien (Learning)	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan dan Perayaan Hari Besar Keagamaan	Karakter masyarakat yg religius	Peribadatan keagamaan	2.039	APBD	Sekretariat daerah	Kemenag, B KPRMI, LPTQ, MUI, NU, Dinsos, Disdik, Dinkes, Satpol-PP, Dishub, Kecamatan & Kelurahan	2019-2021

Program Peningkatan keberdayaan...

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran (Jt)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
Jangka Menengah											
5	Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat	Membangun Ekosistem Belajar Yang Efisien (Learning)	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat yang berperan aktif dalam Pembangunan	Hatinya PKK	Pembinaan Kelompok Kerja Nasional Posyandu Pembinaan Peran PKK dalam Pemberdayaan Masyarakat Gelar Sosialisasi Tepat Guna	4.760	APBD	Disdalduk KB, PMP & PA	Dinas Kesehatan, Kelurahan	2019-2021
6	Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan		Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Jumlah Pengunjung	Book Fair	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	3.210		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Disdik, Universitas,	2019-2021
7	Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah daerah		Prosentase informasi publik yang disampaikan sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2008	Fobarcelona (Forum Banjarbaru cerdas kelola informasi)	Pengelola dan Pemanfaatan Saluran komunikasi Publik	49	APBD	Diskominfo	Komunitas Berbagai elemen	2019	
8	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan prasarana SD dan SMP sesuai Standar	Prosentase sarpras SD dan SMP sesuai standar	Asessment anak berkebutuhan Khusus (ABK)	Penyelenggaraan dana pengembangan sekolah untuk SD, SMP	8.418	APBD	Dinas Pendidikan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bappeda, BPS, BNN, LAPAS, Kejaksaan, ULM, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, POLRES Banjarbaru	2019-2021	
		Peningkatan prasarana SMP sesuai Standar	Prosentase sarpras SMP sesuai standar	Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah Online (PUSTAKON)	Pengadaan Perlengkapan Sekolah Bina SMP	40,8				2019	

Program Wajib Belajar...

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran (Jt)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
Jangka Menengah											
9	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Membangun Ekosistem Belajar Yang Efisien (Learning)	Meningkatnya kemampuan akademi Siswa SD	Persentase Kelulusan SD	Pengembangan aplikasi DAPODIK dan TAKOLA	Penyelenggaraan Siswa baru & ujian Bina SD	372	APBD	Dinas Pendidikan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bappeda, BPS, BNN, LAPAS, Kejaksaan, ULM, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, POLRES Banjarbaru	2019-2021
			Meningkatnya kemampuan akademi Siswa SMP	Persentase Kelulusan SMP		Penyelenggaraan Siswa baru & ujian Bina SMP	302				
			Meningkatnya kemampuan akademi pendidikan non formal	Prosentase Kelulusan paket A		Penyelenggaraan Paket A Setara SD	197				
				Prosentase Kelulusan paket B		Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	249				
	Program manajemen Pelayanan Pendidikan		Meningkatnya Kreatifitas Siswa SD	Prosentase siswa SD mengikuti lomba kreatifitas	Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter (5 karakter, religius, akhlak mulia, cinta tanah air, cinta lingkungan hidup, kewirausahaan)	Pengembangan Sekolah Berbasis Karakter Bina SD	332				
			Meningkatnya Kreatifitas Siswa SMP	Prosentase siswa SMP mengikuti lomba kreatifitas		Pengembangan Sekolah Berbasis Karakter Bina SMP	536				
10	Pendidikan Non Formal		Meningkatnya SDM PNF	Prosentase PNF yang di bina	Kursus Online	Pembinaan Pendidikan, Kursus dan Kelembagaan	56	APBD	Dinas Pendidikan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bappeda, BPS	2019-2021

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran (Jt)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline		
Jangka Menengah													
11	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Meningkatnya kualitas pendidik PAUD	Prosentase pendidik PAUD yg memiliki sertifikat Pendidik	Pelatihan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan kualitas tenaga pendidikan	Penegembangan Mutu dan kualitas rogram Pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	67	APBD	Dinas Pendidikan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bappeda, BPS.	2019-2021		
			Meningkatnya kualitas pendidik SD	Persentase Guru Yang memiliki Sertifikat Pendidik SD					Dinas Pendidikan		2019-2021		
			Meningkatnya kualitas pendidik SMP	Persentase Guru Yang memiliki Sertifikat Pendidik SMP					Dinas Pendidikan		2019-2021		
12	Program Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi		Meningkat Jumlah Layanan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan	Perpustakaan mobile	Peningkatan Layanan Perpustakaan	757	APBD	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Dinas Pendidikan	2019-2021		
13	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat (Security)	terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Sistem monitoring kamtribmas, Apelmas	Patroli Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	4.763	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Polri	2019-2021		
				Meningkatnya Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Kegiatan								Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Polri
				Meningkatnya Pengamanan Kegiatan Insidentil								Koordinasi dan Pelaksanaan Pencegahan Acara Insidentil	Polri

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran (Jt)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
Jangka Menengah											
14	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat (Security)	Mewujudkan suatu sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan alat kelengkapan pemerintah maupun tekno-logi sensor digital atau Internet of Thing (IoT) (LAPOR)	Presentase Ketepatan Tingkat Waktu Tanggap	Sistem Informasi Peringatan Dini Bencana, Masyarakat Peduli Api	Peningkatan kesiagaan penanggulangan bencana	2.883	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kebangpol, BPBD, BNPB, Kesos, TNI, POLRI	2019-2021
15	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat (Security)	Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana di Kota Banjarbaru.	Presentase Tertanganinya Korban Bencana	Tagana siaga bencana	Pengerahan SDM dan Logistik untuk Pemulihan Darurat Penanggulangan Bencana Pos Komando Siaga Bencana	1.875	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kebangpol, BPBD, BNPB, Kesos, TNI, POLRI	2019-2021

Tabel 5 6
Peta Jalan (Roadmap) Pembangunan Smart Environment

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran (Jt)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
Jangka Pendek											
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah (Waste)	Meningkatnya manajemen pengelolaan sampah	Persentase Sampah yang terangkat dari TPS ke TPA	Pengelolaan objek wisata kota Banjarbaru yang bebas sampah	Peningkatan pelayanan dan Pengelolaan kebersihan	6.150	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	Disporabud-par, Pokdarwis	2018-2019
2	Program Kerja Sama Pembangunan		Perusahaan dan atau pendonor yang berkontribusi terhadap pembangunan Kota	Bantuan tempat sampah, pot bunga, sepatu boot, penunjang sekolah, kendaraan toda 3, dan mesin pemotong rumput.	Penyelenggaraan Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Dunia Usaha	250	Dana CSR Swasta	Swasta	Disdik, Kecamatan, Kelurahan	2018	
3	Program Kualitas Kebersihan Lingkungan		Meningkatkan Kualitas Kebersihan Lingkungan	Persentase Sampah yang Dikelola Secara 3R (Reduce, Reuse, Recycle) per Tahun / Jumlah Tonase Sampah yang ada di Kota Per Tahun)	Optimalisasi bank sampah	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan (TPS3ER dan Bank Sampah)	2.665	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan, Kelurahan	2018-2019

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran (Jt)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
Jangka Pendek											
4	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		Meningkatnya Tonase Sampah yang Dikelola Secara 3R	Persentase Sampah yang Dikelola Secara 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik sebagai kantong belanja masyarakat	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	172	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	Bisnis Retail	2018-2019
5	Program Penyediaan Sistem Air Limbah	Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan (Protection)	Mewujudkan infrastruktur air limbah yang berkualitas dan merata	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Pemanfaatan fungsi septictank selain sebagai tempat limbah tinja (Si SEPTI MANJA)	Penyediaan Prasarana dan sarana air limbah (DAK)	14.740	APBD	Dinas PU dan Penataan Ruang	Kecamatan, Kelurahan	2018-2019
						Penyediaan Prasarana dan sarana air limbah	2.733				
						Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	1.425				
6	Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya		Terselesaikannya permasalahan daerah rawan banjir	Persentase penanganan titik rawan banjir	Pembangunan embung sebagai pencegahan banjir, cadangan air dan sumber air untuk pemadaman kebakaran hutan	Peningkatan Pengelolaan Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya	12.830	APBD	Dinas PU dan Penataan Ruang	Dinas Pariwisata	2018-2019

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran (Jt)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
Jangka Pendek											
7	Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam		terkendalinya dampak perubahan iklim	terbinanya Kampung Iklim di Kota Banjarbaru	Pengembangan Kampung Iklim	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	344	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan, Kelurahan	2018-2019
Jangka Menengah											
1	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan (Protection)	Terjaganya tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase tingkat kepuasan masyarakat di Kota Banjarbaru	Masyarakat peduli lingkungan	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Penguatan jejaring informasi Lingkungan pusat dan daerah	2.004	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan, Kelurahan	2019-2021
2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya		Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi	Persentase kinerja sistem irigasi	Sistem informasi jaringan irigasi Kota Banjarbaru	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	58.844 11,76	APBD	Dinas PU dan Penataan Ruang	DKP3	2019-2021

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran (Jt)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timelin e
Jangka Menengah											
3	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.	Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan (Protection)	Terselesaikannya Permasalahan Daerah Rawan Banjir	Persentase penanganan titik rawan banjir	Pembangunan embung sebagai pencegahan banjir, cadangan air dan sumber air untuk pemadaman kebakaran hutan	Peningkatan Pengelolaan Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya	32.275 19.611	APBD	Dinas PU dan Penataan Ruang	Dinas Pariwisata	2019-2021
4	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		terkendalinya dampak perubahan iklim	terbinanya Kampung Iklim di Kota Banjarbaru	Pengembangan Kampung Iklim	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	1.377	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan, Kelurahan	2019-2021
5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		Meningkatnya Tonase Sampah yang Dikelola Secara 3R	Persentase Sampah yang Dikelola Secara 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik sebagai kantong belanja masyarakat	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	650				
6	Program Penyediaan Sistem Air Limbah		mewujudkan infrastruktur air limbah yang berkualitas dan merata	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Sistem Informasi penyediaan sarana dan parasarana air limbah	Penyediaan Prasarana dan sarana Air limbah (DAK)	14.7	APBD	Dinas PU dan Penataan Ruang	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, Kelurahan	2019-2021

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran (Jt)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
Jangka Menengah											
7	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan (Protection)	Meningkatnya kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu	Tingkat kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu	sistem monitoring kondisi lingkungan & air Sistem monitoring polusi udara	Pemantauan kualitas Lingkungan Penyuluhan & Pengendalian Polusi dan Pencemaran	1.200	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan, Kelurahan	2019-2021
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah (Waste)	Meningkatnya manajemen pengelolaan sampah	Persentase Sampah yang terangkat dari TPS ke TPA	Sistem Manajemen Pengelolaan Sampah	Peningkatan Pengelolaan Air Limbah dan Sampah TPA Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi dan pemeliharaan Prasarana dan sarana persampahan Pemeliharaan Rutin TPS dan Kontainer	85.500	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan, Kelurahan	2019-2021

	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Inovasi Smart City	Kegiatan di RKA SKPD mendukung Inovasi Smart City	Usulan Anggaran (Jt)	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Mitra Kerjasama	Timeline
Jangka Menengah											
9	Program Kualitas Kebersihan Lingkungan	Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah (Waste)	Meningkatkan Kualitas Kebersihan Lingkungan	Persentase Sampah yang Dikelola Secara 3R (Reduce, Reuse, Recycle) per Tahun / Jumlah Tonase Sampah yang ada di Kota Per Tahun)	Strategi Pengelolaan Sampah Melalui Kelurahan Sadar Sampah (SEPAK SAMPAH) Pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) / Tempat Sampah	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan & lingkungan (TPS3ER dan Bank Sampah) Peningkatan pelayanan dan Pengelolaan kebersihan	23.200	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan, Kelurahan	2019-2021
10	Mengembangkan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung-jawab (Energy)	Pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan (<i>environmentally friendly</i>) & berkelanjutan (<i>sustainable</i>) serta terjangkau bagi masyarakat. Misalnya pemanfaatan limbah/sampah sebagai biogas, energi surya, tenaga angin, biomassa (tumbuhan & hewan) dan lain-lain.			BIOGAS Limbah Tahu dan sampah TPA	Pendaataan dan pengendalian kerusakan lingkungan	109	APBD	Swasta dan LH	Kemen LH	2019

C. Rencana Program Pembangunan Jangka Panjang

Fase pengembangan tahun 2019-2028 merupakan fase lanjutan dari *Quick Win*. Fase ini merupakan penajaman program pada RPJMD sebagai bentuk implementasi 6 pilar Banjarbaru Kota Cerdas (*Smart City*), sehingga masalah pembangunan dapat diselesaikan dan tujuan pembangunan jangka menengah dapat dicapai dengan manajemen perkotaan Kota Cerdas (*Smart City*).

Tabel 5 7
Rencana Program Pembangunan Jangka Panjang (Tahun 2024-2028)

SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	STRATEGI
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru	Meningkatkan kegiatan ekonomi daerah
		Meningkatkan Investasi daerah
		Meningkatkan sarana dan prasarana Perekonomian
		Meningkatkan PAD
Terwujudnya SDM yang berkualitas, berdaya saing dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia	meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
		Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan terpadu satu pintu
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
Mengembangkan brand kota sebagai kota Pariwisata	Peningkatan Jumlah Wisatawan	Mengembangkan Destinasi Pariwisata
		Updating ekspose konten pariwisata Kota Banjarbaru
		Mengembangkan Kemitraan dengan membentuk kelompok kelompok yang mengembangkan produk berciri lokal serta memiliki unsur kreatifitas dan inovasi yang kuat
Penurunan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni
		Mengurangi tingkat Pengangguran
		Memberdayakan masyarakat miskin melalui pelatihan dan pemberian modal kerja
		Meningkatkan sistem Ketahanan Pangan
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Adipura	Menjaga kualitas lingkungan sesuai baku mutu lingkungan
		Meningkatkan manajemen pengelolaan sampah
		Meningkatkan pengelolaan sampah secara 3R
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH Publik
		Meningkatkan kualitas taman

BAB VI
PENUTUP

Demikian penyusunan Buku Master Plan Banjarbaru Kota Cerdas (*Smart City*) ini kami susun. Dokumen ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan/ pengembangan Kota Cerdas (*Smart City*) di Kota Banjarbaru yang akan dilaksanakan oleh setiap setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru sesuai dengan tugas dan fungsinya, melalui kreativitas, inovatif, sinergis dan berkesinambungan serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen Master Plan ini diharapkan dapat ditetapkan melalui Peraturan Walikota Banjarbaru dan dapat di evaluasi secara bersama-sama sekurang-kurangnya dalam setiap 2 (dua) tahun pelaksanaan atau bersamaan dengan ditetapkannya RPJMD baru.

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI